

PENGENALAN TENTANG

B P S

An Overview of

Statistics Indonesia

PENGENALAN TENTANG BPS

An Overview of BPS-Statistics Indonesia

No Publikasi / *Publication Number*: 02420.0901

Katalog BPS / *BPS Catalogue*: 1299001

Ukuran Buku / *Book Size*: 25 x 18 cm

Jumlah Halaman / *Number of pages*: 99 + viii

Naskah / *Manuscript*:

Bagian Hubungan Masyarakat

Public Relations Division

Penyunting / *Editor*:

Biro Humas dan Hukum

Public Relations and Legal Bureau

Gambar / *Figures*:

Bagian Hubungan Masyarakat

Public Relations Division

Diterbitkan oleh / *Published by*:

Badan Pusat Statistik

BPS-Statistics Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Era globalisasi memberikan perubahan di segala lini tak terkecuali bagi arus informasi statistik dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data.

BPS merupakan organisasi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, mempunyai perwakilan kantor sampai ke tingkat kabupaten/kota serta koordinator statistik kecamatan (KSK) di setiap kecamatan. Sebagai salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang besar, BPS harus mampu mengimbangi perubahan yang ada melalui perubahan strukturnya. Hal ini dimaksudkan agar BPS dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, khususnya bagi pengguna data statistik.



Dengan memberikan informasi tentang BPS termasuk visi, misi, fungsi dan kewenangan yang ada pada BPS, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan mengetahui keberadaan BPS.

Kami menyadari bahwa buku pengenalan BPS edisi 2008 ini masih belum dapat menyajikan informasi tentang BPS secara menyeluruh. Namun kami berharap buku ini dapat dipergunakan sebagai panduan para pengguna data sehingga dapat mengetahui keberadaan BPS dengan lebih baik.

Masukan untuk penyempurnaan buku ini selanjutnya, serta tanggapan dan saran yang bersifat membangun dari segenap BPS akan sangat membantu BPS.

Jakarta, Desember 2008
Kepala Badan Pusat Statistik

Rusman Heriawan

FOREWORDS

In the globalisation era things change continually in every front, so that BPS-Statistics Indonesia must also transformed itself to suit new situations. As an institution directly responsible to the President, BPS, as data provider, significantly contribute in determining the direction development will take.

BPS-Statistics Indonesia is a vertical organisation with branch offices down to the level of district/city. As one large non-departemental government institution, BPS-Statistics Indonesia must be able to counterbalance any change by changing and expanding the structure of its organisation so that it can give better services especially to data users.

By publicizing various information such as vision, mission, function and authorization of BPS-Statistics Indonesia it is hoped that the public will be familiar and knowledgeable about BPS-Statistics Indonesia existence.

We fully realize that this 2008 edition of BPS-Statistics Indonesia Overview is still short of presenting the entire information about BPS-Statistics Indonesia, however, we hope that data user can use the book as a guide to in their effort to know more about BPS-Statistics Indonesia existence.

We invite positive feedbacks and suggestion from its readers which will be use as inputs to the effort to improve subsequent publication of the book.

Jakarta, December 2008
BPS-Statistics Indonesia
Chief Statistician

Rusman Heriawan

DAFTAR ISI / CONTENTS

	Halaman <i>Page</i>
Kata Pengantar <i>Forewords</i>	iii
Daftar Isi <i>Contents</i>	v
Daftar Tabel <i>List Of Tables</i>	vii
1. PENDAHULUAN	
<i>Introduction</i>	1
1.1 Latar Belakang <i>Background</i>	2
1.2 Tujuan <i>Objective</i>	3
2. PROFIL BADAN PUSAT STATISTIK	
<i>Profile of BPS-Statistics Indonesia</i>	5
2.1 Jejak Perjalanan Kegiatan Statistik di Indonesia <i>The Trace of Statistical Activities in Indonesia</i>	6
2.2 Organisasi BPS <i>Organization of BPS-Statistics Indonesia</i>	15
2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi & Kewenangan BPS <i>Position, Task, Function, and Authorization of BPS-Statistics Indonesia</i>	24
2.4 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik <i>Vision and Mission of BPS-Statistics Indonesia</i>	26
3. SISTEM STATISTIK NASIONAL	
<i>National Statistics System</i>	29
4. DATA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK	
<i>Strategic Data of BPS-Statistics Indonesia</i>	37
4.1 Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Ketenagakerjaan dan Kemiskinan <i>Economic Growth, Inflation, Employment, and Poverty</i>	38
4.2 Nilai Tukar Petani <i>Farmer's Terms of Trade</i>	47
4.3 Produksi Padi dan Palawija <i>Rice and Second Crops Production</i>	48

4.4	Ekspor dan Impor <i>Export and Import</i>	50
5. KEGIATAN STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK		
	<i>BPS Statistical Activities</i>	53
5.1	Pengumpulan Data <i>Data Collecting</i>	54
5.2	Cakupan Kegiatan Statistik <i>Scope of Statistical Activities</i>	57
5.3	Pengolahan Data <i>Data Processing</i>	61
5.4	Analisis Data <i>Data Analysis</i>	63
6. DISEMINASI & PELAYANAN INFORMASI STATISTIK		
	<i>Dissemination and Statistical Information Services</i>	65
6.1	Rujukan Statistik <i>Statistical Referral</i>	66
6.2	Publikasi Statistik <i>Statistical Publication</i>	66
6.3	Layanan dan Promosi Statistik <i>Statistical Information and Services</i>	69
7. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	<i>Human Resources Development</i>	73
7.1	Komposisi Pegawai BPS <i>BPS-Statistics Indonesia Personnel Compositio</i>	74
7.2	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) <i>Institute of Statistics</i>	76
7.3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat BPS) <i>Statistical Education and Training Centre of BPS-Statistics Indonesia</i>	82
8. DAFTAR ALAMAT BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI		
	<i>BPS-Regional Office Address</i>	91

DAFTAR TABEL / LIST OF TABLES

	Halaman <i>Page</i>
4.1. Data Realisasi dalam ARAM I, II, III, serta ASEM dan ATAP Produksi Padi/Palawija <i>Data on the Realization of Rice/Staple Food Crops Production in ARAM I, II, III and ASEM, ATAP</i>	50
7.1. Pegawai BPS Menurut Kelompok Umur, Juli 2008 <i>BPS Personnel by Age Group, July 2008</i>	74
7.2. Pegawai BPS menurut Jenis Kelamin, Juli 2008 <i>BPS Personnel by Sex, July 2008</i>	75
7.3. Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan, Juli 2008 <i>BPS Personnel by Educational Level, July 2008</i>	75
7.4. Pegawai BPS Menurut Tingkatan Eselon, Juli 2008 <i>BPS Personnel by Echelon Level, July 2008</i>	76
7.5. Pegawai BPS Menurut Golongan, Juli 2008 <i>BPS Personnel by Rank, July 2008</i>	76
7.6. Pegawai STIS-BPS Menurut Pendidikan & Jabatan Tahun Akademik 2008/2009 <i>STIS-BPS Personnel by Education & Function Year Academic 2008/2009</i>	79
7.7. Lulusan STIS-BPS Tahun Akademik 2008/2009 <i>Graduated of STIS-BPS Year Academic 2008/2009</i>	80
7.8. Fasilitas yang dimiliki Pusdiklat BPS <i>Pusdiklat BPS' facilities</i>	86
7.9. Jenis Diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS <i>Various types of education and training organized by Pusdiklat BPS</i>	87
7.10. Program Beasiswa di BPS <i>Scholarship Program in BPS</i>	89

1

PENDAHULUAN
INTRODUCTION

<http://www.ipsido.id>



1.1. Latar Belakang

Perkembangan Badan Pusat Statistik (BPS) dari masa ke masa dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa dasawarsa yang lalu, tugas BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik belum dirasakan sebagai suatu hal yang mendesak. Semakin hari, peran BPS semakin strategis.

Saat ini, data statistik semakin dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan, namun juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat bagi pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.



Gambar 1.1. Badan Pusat Statistik sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang ditugasi menyelenggarakan statistik dasar, harus mampu mengenalkan diri dan lebih dekat dengan masyarakat.

Figure 1.1. BPS-Statistics Indonesia as the only one government institution that assigned to held basic statistics must be able to introduce itself in order to be closer to public.

BPS membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi lebih besar setelah masyarakat luas lebih mengenal BPS. Berkenaan dengan

1.1. Background

Through time BPS-Statistics Indonesia (or just BPS, for convenience) has developed into a more and more sophisticated statistical agency, its development is invariably influenced by the development of activities in other fields notably social, economic, and politic because those are the areas where development programs are normally focused on.

Nowadays, statistical data and information are becoming more and more important in national development process, because they are used not only by the government as input into planning and policy making, but also by private sector and members of the general public in making business decisions and other purposes.

In the execution of its duty, BPS cannot possibly go alone but it needs support and cooperation from the general public as well as other parties. The support is expected to be continual and become stronger and stronger in order that the general public become more and

hal tersebut BPS kembali menyajikan buku Pengenalan Badan Pusat Statistik edisi keenam, yang dipublikasikan dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.

Edisi ini tidak hanya berisi penjelasan tentang kelembagaan BPS saat ini, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga menyajikan perjalanan BPS yang telah merekam fenomena perkembangan sosial-ekonomi, dari waktu ke waktu. Sebagai catatan, buku serupa yang menyajikan tentang pengenalan BPS telah dipublikasikan pada tahun 1980, 1990, 1994, 1996 dan 2003.

1.2. Tujuan

Buku Pengenalan Badan Pusat Statistik bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih mengenal lembaga dan kegiatan BPS. Di sisi lain, bertambahnya pengenalan diharapkan diikuti oleh meningkatnya kesediaan untuk membantu BPS dalam pergulatannya menyediakan data yang berkualitas. Selain itu, melalui buku ini, diharapkan masyarakat umum dapat bekerja sama dengan BPS dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Lebih jauh, khususnya narasi berbahasa Inggris, berguna untuk memperkenalkan BPS kepada tamu dari mancanegara, baik yang berasal dari lembaga statistik, lembaga internasional, maupun dari lembaga-lembaga lainnya.

more acquainted with BPS, for greater familiarity means greater support. It is for that reason that BPS endures to again take the step to publish the sixth edition of the book "Overview of BPS-Statistics Indonesia" made available in two languages, Bahasa Indonesia and English.

This current edition will not only be contained with the explanation of BPS current organizational structure, its task scope, and responsibility, but also with the description of its temporal journey in gathering facts that portray social-economic development phenomena from time to time. It is noteworthy that similar books containing the introductory information on BPS-Statistics Indonesia have already been published in 1980, 1990, 1994, 1994 and 2003.

1.2. Objective

This book "Overview of BPS-Statistics Indonesia" is intended, on one hand, to assist community members to enhance their knowledge about BPS-Statistics Indonesia organisation and activities. On the other hand, it is expected that the deeper familiarity will be followed by improvement in willingness to help BPS in its plight to try to realize the continual provision of high-quality statistical data. Furthermore, this book, especially the English narration, is expected to contain the needed material that can promote the image of BPS-Statistics Indonesia abroad winning the opinion of foreign visitors, both from statistical and non-statistical organisations.

2

PROFIL BADAN PUSAT STATISTIK
PROFILE OF BPS~STATISTICS INDONESIA

<http://www.bps.go.id>



2.1. Jejak Perjalanan Kegiatan Statistik di Indonesia

a. Masa Pemerintah Hindia Belanda

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang ke-36 sebagai perwakilan koloni Belanda-Perancis, Herman Willem Daendels (1808-1811). Gubernur Daendels menginginkan pemerintahannya memiliki data statistik yang kuat dan handal. Dengan data statistik, pemerintah memiliki pegangan dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dalam mengeksploitasi wilayah, khususnya Pulau Jawa, daerah tugasnya yang harus dilindunginya dari tentara Inggris.

Pengganti Daendels, Jan Willem Jansens yang diteruskan oleh Lord Minto tidak dapat mempertahankan Pulau Jawa. Saat itu koloni Belanda-Perancis jatuh ke tangan Inggris. Selanjutnya yang menjadi gubernur jenderal di Hindia-Belanda adalah Stamford Raffles (1811-1816). Sekitar tahun 1815, sensus penduduk pertama kali dilakukan dengan cakupan wilayah Jawa dan Madura. Sensus Penduduk ini mendapat kritikan mengenai metodologi dan cakupan dari seorang tokoh yang bernama Hertog van Hogendorp. Meski demikian, sensus penduduk tersebut telah menyatakan jumlah penduduk Pulau Jawa sebesar 4.615.270 jiwa.

Dengan perkembangan kegiatan statistika, pada tahun 1821 diterbitkan *Statistics Year Book* yang pertama. Ide pembuatan *Statistics Year Book* dirancang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen (1816-1826). Publikasi ini merupakan awal mula buku Statistik Indonesia yang kita kenal saat ini. Dalam masa penyusunannya, beliau

2.1. The Trace of Statistical Activities in Indonesia

a. The Netherlands-Indies Administration Period

Statistical activities in Indonesia have already begun since the Dutch colonial period, to be precise, during the 36th period of Netherlands-Indies Governor General Herman Willem Daendels (1808-1811), who was assigned to be the ruler of the Netherlands-France colony at that time. Daendels wanted his government administration to have high-quality and reliable statistical data, because he thought that by having appropriate statistical data, the government had the basis for identifying and determining priority in exploiting the region, especially Java Island, the place where he worked and tasked to defend the colony from British threat.

Daendels successor, Jan Willem Jansens and subsequently followed by Lord Minto, couldn't defend Java Island. So, Netherlands-France colony fell into British hands. The next Netherlands-Indies Governor General was Stamford Raffles (1811-1816). It was in Raffles' period, around 1815, that the first population census was undertaken covering Java and Madura. The census was criticized with respect to its methodology and scope by Hertog van Hogendorp, a prominent figure at that time. Nonetheless, the census was successful in producing statistical data on total number of population in Java Island, i.e., 4.615.270 persons.

The next development of statistical activities in Indonesia was the first publication of *Statistical Year Book* in 1821. The idea for the endeavor came from Netherlands-Indies Governor General, Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen (1816-1826). This publication pioneers the book we now know as *Statistics Indonesia*. During the preparation

memerintahkan seluruh gubernur dan residen untuk membuat kompilasi data statistik yang beragam dan rinci dalam satu publikasi. Kerangka dan pembagian bab serta daftar isi buku tersebut disiapkan sendiri oleh Gubernur Van der Capellen. Namun sejarah mencatat bahwa publikasi tersebut belum sepenuhnya mulus. Hal yang menjadi penyebab diantaranya banyak daerah yang belum sepenuhnya siap menyajikan data seperti yang telah dirancang oleh Van der Capellen.

Tahun 1849 merupakan era baru bagi perstatistikan di Hindia-Belanda. Pada masa ini, barulah publikasi *Statistics Year Book* yang pernah diidamkan oleh Van der Capellen mulai dapat diterbitkan secara teratur. Publikasi tersebut berisi kumpulan data sosial-politik dan ekonomi (*Staatkundige en Staatthuishoudkundige Jaarboekjes*).

stage, the governor general ordered all governors and regents to compile variegated and detailed statistical data to be contained in one publication. The book's structure, segmentation, and table of contents were made by Governor Van der Capellen himself. But history tells us that the publication was not entirely without faults. The reason for that was the fact that many of the regions were not ready to provide the kinds of data Van der Capellen had in mind.

The year 1849 was a new era of statistics in the Netherlands East Indies. It was in this period that Statistics Year Book publication envisioned by van der Capellen was able to be published regularly. This publication contained collection of social-politics and economic data (Staatkundige en Staatthuishoudkundige Jaarboekjes).



Gambar 2.1. Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam gambar terlihat seorang pegawai kantor statistik zaman tersebut sedang melakukan kegiatan pengolahan data.

Figure 2.1. In Indonesia statistical activities have been administered since the Netherlands-Indische period. Picture shows an officer of statistical office at that time doing a data processing job.

Pada tahun 1864 ditetapkan dinas khusus yang bertanggung jawab pada pengadaan dan penyusunan publikasi statistik (*Afdelling Statistiek*), dibawah

It was noted that in 1864, there was a specific office tasked to provide and compose statistics publication (Afdelling Statistiek), under direct control of Statistics

koordinasi langsung Sekretariat Jenderal. Mulai tahun 1864 ini, Dinas Statistik terus terpelihara.

Pada Februari 1920, lembaga yang menangani kegiatan statistik dibentuk oleh Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan (*Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel*) saat itu di bawah Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan berlokasi di Bogor. Tugasnya mengolah dan mempublikasikan data statistik.

Secretary-General Office. Statistics Agency continues to exist since that year.

On February 1920, the agency handling statistical activities was formed by the director of Agriculture, Industry, and Trade (Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel), the subsidiary organisation of the Ministry of Agriculture, Industry and Trade, situated in Bogor. Its tasks were processing and publicizing statistical data.



Gambar 2.2. *Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS)* adalah sebuah unit pada *Departement van Economische Zaken* yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data statistik pada masa pemerintah kolonial Belanda.
 Figure 2.2. *Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS)* was the unit within the *Departement van Economische Zaken (Economic Department)* responsible for statistical data collection during the Dutch colonial period.

Pusat kegiatan kantor statistik ini kemudian pindah ke Jakarta pada tanggal 24 September 1924 dengan nama *Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS)* atau Kantor Pusat Statistik, tepatnya di Weltevreden, Batavia-Centrum (daerah tersebut kini merupakan wilayah di Jakarta Pusat). Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1930 lembaga ini mengerjakan suatu kegiatan monumental, yaitu Sensus Penduduk yang pertama dilakukan di seluruh

On September 24, 1924 the office, named Centraal Kantor voor de Statistiek (CKS) or Central Office of Statistics, was moved to Jakarta occupying a building situated in Weltevreden, Batavia-Centrum (now the area belongs to Central Jakarta mayoralty). Its activities were chiefly focused on supporting Netherlands-Indies government policy. In 1930, this office engaged in a monumental work called volkstelling or population census which was the first one in Indonesia. The legal basis supporting the Central

Indonesia. Perangkat lunak kelembagaan Kantor Pusat Statistik adalah *Volkstelling Ordonnantie* 1930 (*Staatsblad* 1930 Nomor 128) yang mengatur sensus penduduk dan *Statistiek Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan. Beberapa tahun kemudian, CKS berada di bawah Departemen Urusan Ekonomi (*Department van Economische Zaken*).

b. Masa Pemerintahan Jepang

Pada tahun 1942-1945 CKS beralih dibawah kekuasaan pemerintah militer Jepang. Keegiatannya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan perang/militer dan berada di bawah Gubernur Militer (*Gunseikanbu*), dengan nama *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu*.

c. Masa Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.

Pada awal tahun 1946 bersamaan dengan berpindahya kegiatan Pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, kegiatan KAPPURI pun dipindahkan ke Yogyakarta dipimpin oleh Semaun. Sementara itu, Pemerintah Federal Belanda (NICA) di Jakarta mengaktifkan kembali CKS yang sempat dikuasai Jepang.

Ketika pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, pusat kegiatan pemerintahan RI pun kembali ke Jakarta. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., kedua lembaga, yaitu KAPPURI dan CKS diintegrasikan menjadi

Office of Statistics was Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 number 128) which regulate population census implementation while Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Number 508) ordain other statistical activities. A few years after that, CKS was transformed to the Ministry of Economics Affairs (Department van Economische Zaken).

b. The Japanese Administration Period

In 1942-1945 period, CKS was transferred to the authority of the Japanese Military Government. Its activities were accentuated to mainly fulfil war/military needs. Consequently, the Central Office of Statistics was secured under the management of the military governor (*Gunseikanbu*) called *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu*.

c. The Period of Republic Indonesia Government

After the Republic of Indonesia (RI) proclaimed its independence on 17 August 1945, *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* was nationalized and its name changed into Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI), which can be translated as the Republic of Indonesia General Statistical Investigation Office, led by Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.

Early in 1946, when the Indonesian government moved from Jakarta to Yogyakarta, KAPPURI—led by Semaun—also moved to Yogyakarta. Meanwhile, in Jakarta, the Federal Government of the Netherlands (NICA) reactivated the CKS that was once controlled by the Japanese.

As the Dutch government recognized the sovereignty of the Republic of Indonesia, the RI central government moved back to Jakarta. According to a Prosperity Ministry circular note dated 12 June 1950 Number 219/S.C., the two institutions, i.e., KAPPURI and CKS, were integrated into Central

Kantor Pusat Statistik (KPS) yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Pada tanggal 1 Maret 1952, melalui Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian. Dengan diterbitkannya SK Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian, yaitu *Afdeling A* merupakan Bagian Riset dan *Afdeling B* merupakan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131 Tahun 1957, Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan Keppres X Nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik yang tanggung jawab dan wewenangnya berada langsung di bawah Perdana Menteri.

Pada tahun 1960 diundangkan dua buah Undang-Undang (UU), yaitu UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai pengganti *Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128)* dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik yang diundangkan pada tanggal 26 September 1960 sebagai pengganti *Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1934 Nomor 508)*.

Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958 tentang pemberian tugas kepada BPS untuk menyelenggarakan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk dan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1960, BPS dipercaya menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama setelah Indonesia merdeka. Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1961.

Statistics Office (KPS), placed under the management of the Minister of Prosperity.

On 1 March 1952, by the Minister of Economic Affairs Decree Number P/44, KPS was put under and responsible to the Minister of Economic Affairs. By the issuance of the Minister of Economic Affairs Decree Number 18.099/M on 24 December 1953, KPS activities were divided into two afdeling (divisions), i.e., Afdeling A, tasked to do research, and Afdeling B, tasked with organization and administration affairs.

Based on the Presidential Decree Number 131 of 1957, the Ministry of Economic Affairs was split into Ministry of Trade and Ministry of Industry. According to the Presidential Decree X Number 172 dated 1 June 1957, KPS became Biro Pusat Statistik (BPS), or Central Bureau of Statistics in English, which responsibility and authorization are directly under the Prime Minister.

In 1960, two laws were issued, namely Law Number 6 Year 1960 on Census, enacted on 24 September 1960, to replace Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Number 128), and Law Number 7 Year 1960 on Statistics, enacted on 26 September 1906, to replace Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1934 Number 508).

On the basis of the Prime Minister Decree Number 26/P.M/1958, dated 16 January 1958 on the Assignment of BPS to Organize the Preparation of Population Census, and in line with Article 2 of Law Number 6 of 1960, BPS was tasked to administe the first population census since Indonesia independence. The census was implemented simultaneously throughout Indonesia in 1961.

Pelaksanaan Sensus Penduduk di tingkat propinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur, di tingkat kabupaten/kota (dulu disebut kotamadya) dilaksanakan oleh kantor bupati/walikota. Sedangkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk.

At provincial level, the census was undertaken by governor offices, at regency/city level (once referred to as municipality) by regent/mayor offices, whereas at subdistrict level, by a unit assigned to handle the population census.



Gambar 2.3. Pada tahun 1971, BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang kedua setelah Indonesia merdeka. Petugas lapangan direkrut melalui 4 tahap pelatihan: pelatihan instruktur utama, pelatihan instruktur nasional, pelatihan instruktur daerah, dan pelatihan pencacah. Pencacah adalah mereka yang melaksanakan pengumpulan data. Foto di atas diambil di depan salah satu tempat pelatihan di Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Figure 2.3. In the year 1971, BPS conducted the second population census after independence. Qualified field workers were produced through 4 phases of training: principal instructors training, national instructors training, regional instructors training, and the training of the enumerators. Enumerators are those responsible for collecting the data. The picture above was taken in front of one of the training sets in Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Kemudian dengan Keppres Nomor 47 Tahun 1964 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 1964, pemerintah menetapkan susunan dan organisasi BPS, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965 pada tanggal 19 Februari 1965, Bagian Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Kabupaten/Kota berubah menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah.

Subsequently, by the Presidential Decree Number 47 Year 1964, enacted on 20 January 1964, the government stipulated the composition and organization of BPS, and thereafter, on the basis of the Cabinet Presidium Decree Number Aa/C/9 Year 1965 dated 19 February 1965, census divisions in governor and regency/city offices were changed into regional census and statistics offices.

Dengan semakin pentingnya peran BPS dalam menyediakan data statistik untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, pemerintah mengundang tiga Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sensus, yaitu PP Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian yang diundangkan pada tanggal 21 Januari 1983, dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 1985.

As the role of BPS in providing statistical data to fulfill the needs of development planning and evaluation increased the government issued three government regulations (PP) on census, namely, Government Regulation Number 21 Year 1979 on the Implementation of Population Census, enacted on 2 July 1979, Government Regulation Number 2 Year 1983 on Agricultural Census, enacted on 21 January 1983, and Government Regulation Number 29 Year 1985 on Economic Census, enacted on 10 June 1985.



Gambar 2.4. Beberapa kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS sejak Indonesia merdeka diantaranya kegiatan Rapat Kerja Statistik tahun 1972 (kiri) dan pelatihan Survei Inventarisasi Hewan tahun 1967 (kanan).

Figure 2.4. Several statistical activities held by BPS-Statistics Indonesia since Indonesia's independence such as Statistical Technical Meeting in 1972 (left) and workshop of Animal Inventarization Survey in 1967 (right).

Sedangkan untuk kelembagaan BPS, pemerintah telah mengundang PP Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 1968. Dengan makin meningkatnya peran dan tugas BPS, PP Nomor 16 Tahun 1968 kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 20 Februari 1980. Dua belas tahun kemudian

As for BPS organisational status, the government enacted Government Regulation Number 16 Year 1968 on the Status of BPS Organization, enacted on 29 May 1968. As BPS roles and duties increased, that Government Regulation Number 16 Year 1968 too was enhanced with Government Regulation Number 6 Year 1980 on BPS Organization, enacted on 20 February 1980. Twelve years later, Government

PP Nomor 6 Tahun 1980 disempurnakan dengan PP Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 1992.

Sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 2 Tahun 1992, ditetapkan Keppres Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 1992.

Sesuai dengan berbagai perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai pengganti kedua UU tersebut, ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang diundangkan pada tanggal 19 Mei 1997. Nomenklatur kelembagaan dari Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 antara lain:

- 1) Jenis statistik dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yang terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- 2) Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.

Regulation Number 6 Year 1980 was refurbished with Government Number 2 Year 1992 on BPS Organization, enacted on 9 January 1992.

As the implementation guidance to Government Regulation Number 2 Year 1992, the Presidential Decree Number 6 Year 1992 on BPS Position, Duties, Roles, Organizational Structure, and Work System, enacted on 9 January 1992.

As condition, public demand, and national development needs changed, Law Number 6 of 1960 on Census and Law Number 7 of 1960 on Statistics were no longer considered to be relevant with the living conditions of the nation and the progress of science and technology.

To replace the two laws, Law Number 16 Year 1997 on Statistics was enacted on 19 May 1997. The institutional nomenclature of the Central Bureau of Statistics was changed to BPS-Statistics Indonesia.

New additions to the materials contained in Law Number 16 of 1997 are, among others, as follows:

- 1) *The types of statistics are classified according to the purpose they are to be used, namely, basic statistics, that is, those BPS fully administer, sectoral statistics, i.e., those compiled by government institutions, either independently or in cooperation with BPS, and special statistics, i.e., those organized by institutions, organizations, individuals, and or other community elements independently or in cooperation with BPS.*
- 2) *The results of statistics compiled by BPS are publicized in Official News of Statistics (BRS) in regular and transparent manner, so that people are informed about the data and/or or in a position to access them easily.*

- 3) Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- 4) Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1997 maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Keppres Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Kemudian pemerintah juga mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang diundangkan pada tanggal 26 Mei 1999, yang merupakan pengganti dari PP Nomor 21 Tahun 1979, PP Nomor 2 Tahun 1983, dan PP Nomor 29 Tahun 1985.
- 2) Memasuki era otonomi daerah, beberapa Keppres yang ada sebelumnya diganti dengan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Keppres Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas LPND. Kemudian Keppres Nomor 166 Tahun 2000 kemudian diganti dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dan Keppres 178 Tahun 2000 diganti dengan Keppres 110 Tahun 2001. Sebagai pelaksanaan keppres tersebut diterbitkan Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah yang lebih rinci.

- 3) *A reliable, effective, and efficient system of National Statistics.*
- 4) *The formation of Statistics Community Forum that will function as a receptacle of aspirations of statistical community whose duty is to give advice and counsel BPS.*

As a consequence of implementation guide to Law Number 16 years 1997, several regulations are issued, among others, as follows:

- 1) *Presidential Decree Number 86 Year 1998 on BPS-Statistics Indonesia. After that the government stipulated Government Regulation Number 51 Year 1999 on the Implementation of Statistics, enacted on 26 May 1999, that replaced Government Regulation Number 21 Year 1979, Government Regulation Number 2 Year 1983, and Government Regulation Number 29 Year 1985.*
- 2) *As the country entered the regional autonomy era, several previously existing presidential decrees were replaced by Presidential Decree Number 166 Year 2000 on the Position, Duties, Roles, Authorization, Organizational Structure, and Working System of Non-departmental Government Institutions (Lembaga Pemerintah Nondepartemen/LNPD) and the Presidential Decree Number 178 Year 2000 on the Organizational Structure and Duties of LPND. Afterwards, the Presidential Decree Number 166 Year 2000 was replaced by Presidential Decree Number 103 Year 2001, and the Presidential Decree Number 178 Year 2001 was replaced by Presidential Decree Number 110 Year 2001. As the implementation guide to those presidential decrees, BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician issued Decree Number 001 Year 2001 on BPS Organization and Work System and Decree Number 121 Year 2001 on the Organization and Work System of BPS Regional Branches in more detail.*

- 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, yang menetapkan BPS sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- 4) Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik yang ditetapkan pada 26 Agustus 2007. Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala BPS No.7 Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

2.2. Organisasi BPS

a. BPS Pusat

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, maka susunan organisasi BPS terdiri atas:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat Utama;
- 3) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- 4) Deputi Bidang Statistik Sosial;
- 5) Deputi Bidang Statistik Produksi;
- 6) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- 7) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- 8) Inspektorat Utama;
- 9) Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 10) Instansi Vertikal.

- 3) *Minister of State Apparatus Empowerment Decree Number 66/KEP/M.PAN/7/2003 on Computer Software Functional Officers and Its Credit Points appointed BPS as the institution that takes care of the computer software functional officers.*
- 4) *In order to strengthen BPS organizationally, the government issued the Presidential Regulation Number 86 Year 2007 on BPS, enacted on 26 August 2007. As the implementation to the regulation, BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician issued Regulation Number 7 Year 2008 on BPS Organization and Work System, enacted on 15 February 2008.*

2.2. The Organization of BPS-Statistics Indonesia

a. BPS-Statistics Indonesia Headquarters

By the enactment of the Presidential Decree Number 86 Year 2007 on BPS-Statistics Indonesia, followed by the issue of Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia Regulation Number 7 Year 2008 on the Organization and Work System of BPS, BPS organizational structure comprises of the following units:

- 1) *Chief Statistician;*
- 2) *Principal Secretariat;*
- 3) *Deputy Director General of Methodology and Statistical Information;*
- 4) *Deputy Director General of Social Statistics;*
- 5) *Deputy Director General of Production Statistics;*
- 6) *Deputy Director General of Distribution and Services Statistics;*
- 7) *Deputy Director General of National Accounts and Statistical Analysis;*
- 8) *Prime Inspectorate;*
- 9) *Training and Education Center; and*
- 10) *Vertical branches.*

BPS dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri atas lima biro, setiap biro terdiri atas beberapa bagian dan setiap bagian terdiri atas beberapa subbagian. Sekretariat Utama terdiri atas Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

BPS is led by a director general who is tasked to administer governmental duty in statistical affairs as stipulated by the existing laws and regulations.

Principal Secretary is tasked to coordinate plans, education, control over programs, administration, and resources in BPS circle. The Principal Secretary consists of five bureaus, where each bureau comprises several divisions, and each division comprises several subdivisions. The five bureaus under the Principal Secretary are Program Management Bureau, Finance Bureau, Personnel Bureau, Public Relations and Legal Affairs Bureau, and General Affairs Bureau.



Gambar 2.5. Foto dan nama Kepala BPS mulai yang pertama sampai sekarang.

Figure 2.5. Photos and names of Chief Statistician of BPS-Statistics Indonesia, from the first to the present.

Struktur organisasi BPS memiliki lima deputi, dimana setiap deputi terdiri atas beberapa direktorat, setiap direktorat terdiri atas subdirektorat, dan setiap subdirektorat membawahi beberapa seksi.

In BPS organization structure there are five deputy director generals, each deputy leads three directorates, each directorate comprises of several sub-directorates; and each sub-directorate controls several sections.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri atas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri atas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri atas Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa terdiri atas Direktorat Statistik Distribusi, Direktorat Statistik Harga, dan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri atas Direktorat Neraca Produksi, Direktorat

Deputy Director General of Methodology and Statistical Information is tasked to formulate and implement policies in the field of methodology and statistical information. Deputy Director General for Methodology and Information System consists of three directorates: Census and Survey Methodology Development Directorate, Statistical Dissemination Directorate, and Statistical Information System Directorate.

Deputy Director General of Social Statistics is tasked to formulate and implement policies in the field of social statistics. Deputy Director General for Social Statistics consists of three directorates: Population and Workforce Statistics Directorate; Social Welfare Statistics Directorate; and Social Resilience Statistics Directorate.

Deputy Director General of Production Statistics is tasked to formulate and implement policies in the field of production statistics. Deputy Director General for Production Statistics consists of three directorates: Agricultural, Horticultural, and Plantation Statistics Directorate, Animal Husbandry, Fishery, and Forestry Statistics Directorate, and Industrial Statistics Directorate.

Deputy Director General of Distribution and Services Statistics is tasked to formulate and implement policies in the field of distribution and services. Deputy Director General of Distribution and Services Statistics consists of three directorates: Distribution Statistics Directorate, Price Statistics Directorate, and Finance, Information Technology, and Tourism Statistics Directorate.

Deputy Director General of National Account and Statistical Analysis is tasked to formulate and implement policies in the field of accounts and statistical analysis. Deputy Director General of National Account and Statistical Analysis consists of three directorates: of Production Accounts Directorate,

Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Bagian Administrasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Expenditure Accounts Directorate, and Analysis and Statistical Development Directorate.

Prime Inspector is tasked to conduct functional supervision over duties implementation in BPS. The Prime Inspector consists of Region I Inspectorate, Region II Inspectorate, Region III Inspectorate, Administration Unit; and Functional Officers Group.



Gambar 2.6. Kepala BPS (Rusman Heriawan) beserta para Eselon I setelah pelantikan pada 3 Desember 2007. Dari kiri ke kanan: Sunari Sarwono (Inspektur Utama), Sihar Lumbantobing (Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik), Slamet Sutomo (Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik), Rusman Heriawan (Kepala BPS), Subagio Dwijosumono (Sekretaris Utama), Ali Rosidi (Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa), Pietoyo (Deputi Bidang Statistik Produksi), dan Arizal Ahnaf (Deputi Bidang Statistik Sosial).

Figure 2.6. Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia and all Echelon I Officers after Installation Ceremony on December 3th, 2007. From left to right: Sunari Sarwono (Prime Inspector), Sihar Lumbantobing (Deputy Director General of Methodology and Statistical Information), Slamet Sutomo (Deputy Director General of National Account and Statistical Analysis), Rusman Heriawan (Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia), Subagio Dwijosumono (Principal Secretary), Ali Rosidi (Deputy Director General of Distribution and Services Statistics), Pietoyo (Deputy Director General of Production Statistics), and Arizal Ahnaf (Deputy Director General of Social Statistics).

Di samping biro, direktorat, dan inspektorat, juga terdapat Pusat Pendidikan dan Pelatihan

In addition to the bureaus, directorates, and inspectorates, there is a Center of

(Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang komputer, statistik, serta pendidikan dan pelatihan fungsional dan kepemimpinan serta sebuah sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta. Struktur organisasi STIS didasarkan pada Keputusan Kepala BPS Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja STIS. STIS dipimpin oleh seorang Ketua. Perihal Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta STIS akan diuraikan secara lebih rinci dalam topik pengembangan sumber daya manusia di BPS.

Struktur organisasi BPS (Kantor Pusat) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 ditunjukkan oleh gambar 2.7.

b. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

Sebagai instansi vertikal, BPS mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2008, BPS sudah mempunyai perwakilan di 33 propinsi dan 465 kabupaten/kota.

BPS Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala BPS Provinsi yang membawahi 6 Bidang/Bagian yaitu: Bagian Tata Usaha, Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Distribusi, Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Sedangkan BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala BPS Kabupaten/Kota. Perwakilan BPS di daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

Education and Training (Pusdiklat), which responsibility is to organize education and training in the field of computer, statistics, education and training for functional and leadership qualities, and a School of Statistics (STIS). The establishment of STIS is based on the Presidential Decree Number 163 of 1998 on School of Statistics as the official higher education of the Central Statistics Agency located in Jakarta. The organizational structure of STIS is based on the Decree of Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia Number 101 of 1998 on the Organization and Administration of STIS. The school is led by a chairperson. Detailed information on the Center of Education and Training, as well as STIS will be discussed under the topic of human resource development in BPS.

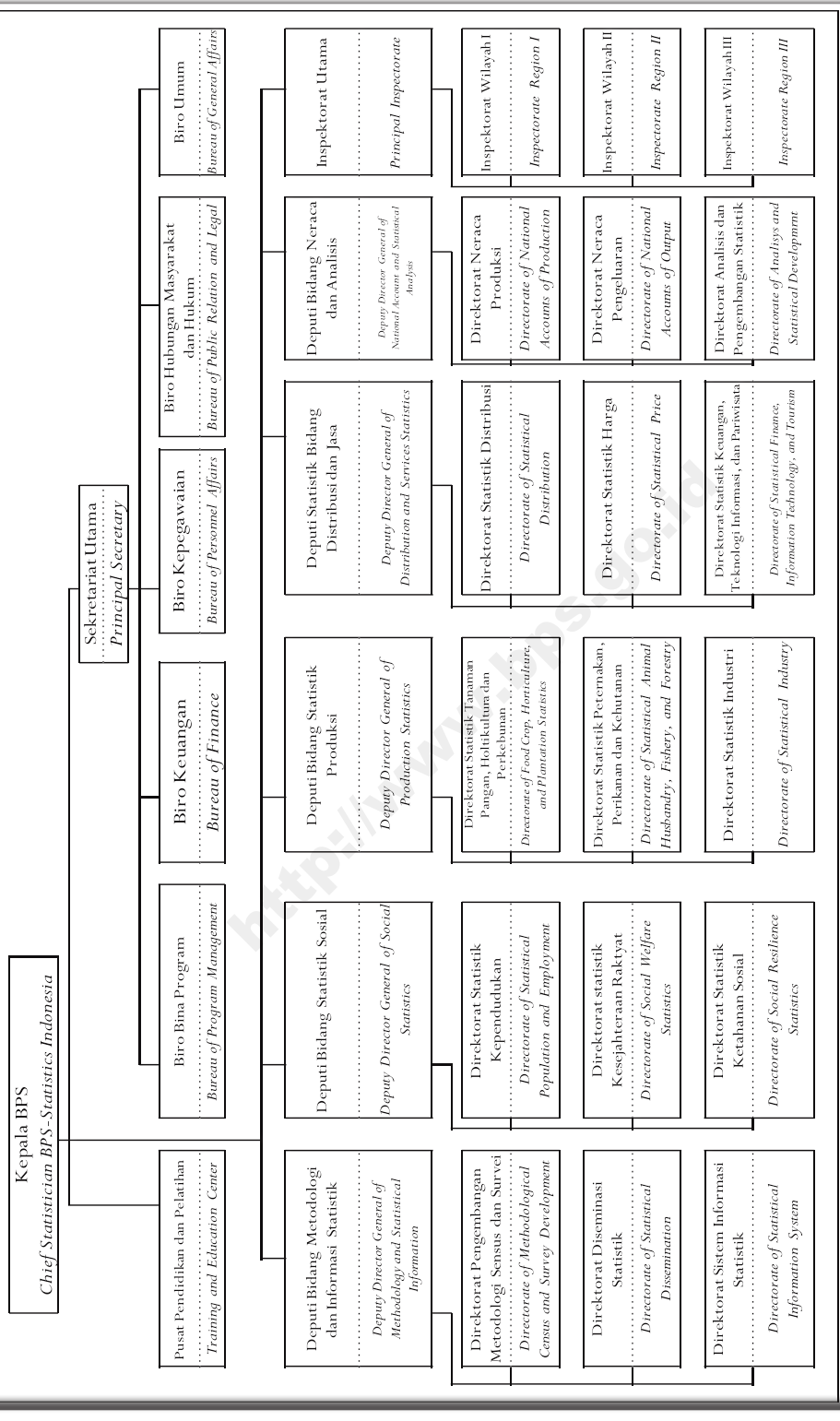
The organizational structure of BPS (National Office) as stipulated in the Decree of Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia Number 7 of 2008 can be seen in figure 2.7.

b. BPS Province and BPS Regency/City

As vertical institution, BPS has representative offices at provincial and regency/city levels. In 2008 BPS already has representatives in 33 provinces and 465 regencies/cities.

BPS Province is led by a Head of BPS Province directing 6 divisions, namely Division of Administration, Division of Social Statistics, Division of Production Statistics, Division of Distribution Statistics, Division of Regional Balance and Statistical Analysis, and Division of Integrated Processing and Statistical Dissemination. BPS Regency/City is led by a Head of BPS Regency/City. BPS representatives in the regions are responsible for conducting census

Struktur Organisasi BPS Pusat / Organization Structure of BPS Headquarter



Gambar 2.7. Bagan Struktur BPS Pusat
Figure 2.7. Structure of BPS Headquarters

sensus dan survei serta bertugas membantu Pemerintah Daerah setempat dalam penyediaan data yang diperlukan.

Sebagai pelaksanaan dari Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 178 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 110 Tahun 2001, Kepala BPS menetapkan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah.

Struktur Organisasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 disajikan dalam gambar 2.11 dan gambar 2.12.

and survey activities, as well as assisting the local administration in providing necessary data.

As the implementation of the Presidential Decrees Number 166 of 2000 and Number 178 of 2000, which have been replaced by the Presidential Decrees Number 103 of 2001 and Number 110 of 2001, the Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia stipulated Decree Number 121 of 2001 on the Organization and Administration of BPS Representatives at the regional levels.

The organizational structure of BPS Province and BPS Regency/City as stipulated in the Decree of Chief Statistician BPS-Statistics Indonesia Number 121 of 2001 can be seen in figures 2.11 and 2.12.



Gambar 2.8. Dua kantor perwakilan BPS di daerah yaitu di Provinsi Jambi (kiri) dan Kabupaten Tasikmalaya (Kanan).

Figure 2.8. Two BPS regional branch offices, Jambi Province (left) and Tasikmalaya Regency (Right)



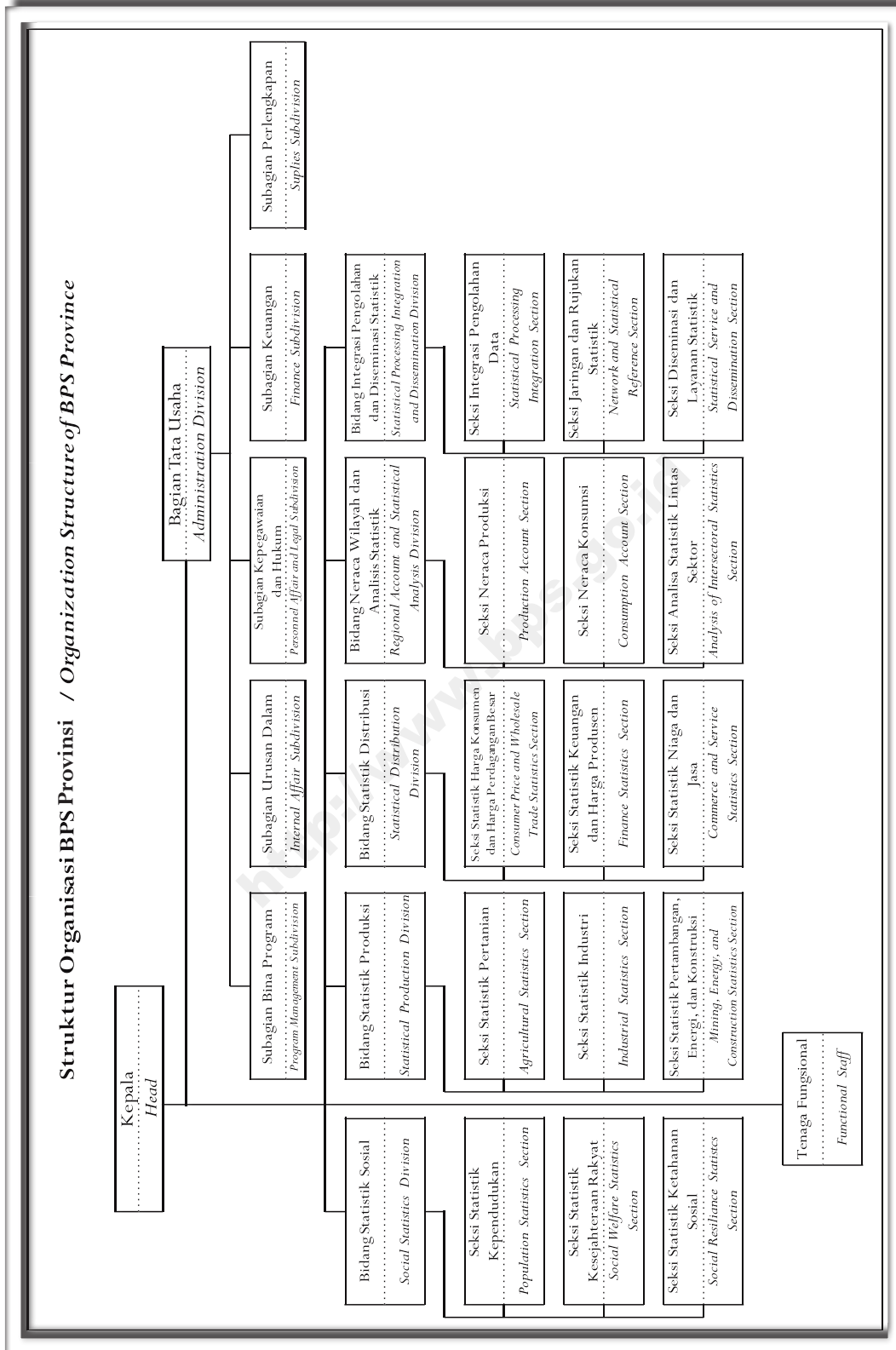
Gambar 2.9. Dalam upaya untuk lebih mensosialisasikan BPS kepada masyarakat, salah satu yang dilakukan BPS adalah dengan membuat rancangan kantor perwakilan yang sama modelnya. Gambar di sebelah kiri menunjukkan prototip kantor perwakilan BPS di tingkat propinsi sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan kantor perwakilan BPS di tingkat kabupaten/kota.

Figure 2.9. To better socialize BPS to the public, one scheme implemented by BPS is by making the model of BPS regional branch offices plan similar to each other. Picture on the left shows the prototype of BPS provincial branch office while that on the right shows BPS regency/city branch office.

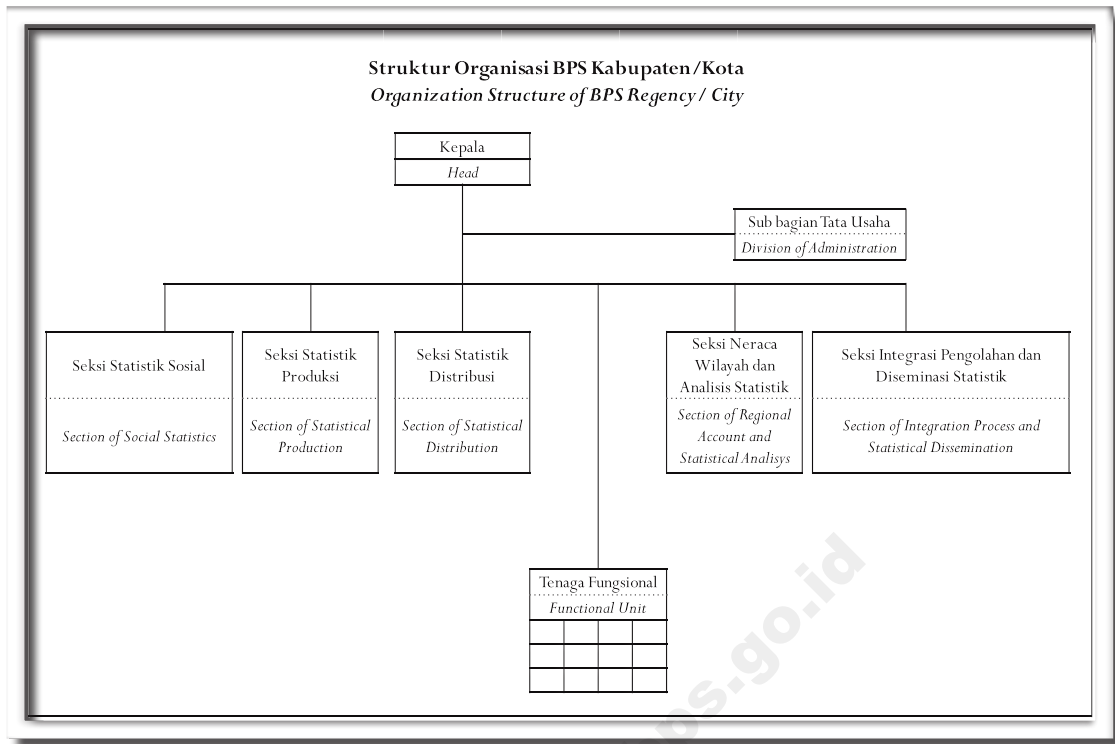


Gambar 2.10. Di beberapa daerah telah berdiri kantor perwakilan BPS yang bentuknya disesuaikan dengan prototip kantor BPS pada gambar 2.9. diatas. Gambar di sebelah kiri menunjukkan kantor BPS Propinsi Jambi, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah kantor BPS Kabupaten Tasikmalaya saat ini.

Figure 2.10. In several region, BPS Regional Branch Office had costumized with the model of BPS Regional Office as shows in figure 2.9. above. Picture on the left shows BPS Regional Branch Office in Jambi Province while picture on the right shows BPS Regional Branch Office in Tasikmalaya Regency.



Gambar 2.11. Bagan Struktur Organisasi BPS Provinsi
 Figure 2.11. Structure of BPS Province Organisation



Gambar 2.12. Bagan Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota.
Figure 2.12. Structure of BPS Regency/City Organisation.

2.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPS

a. Kedudukan

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

b. Tugas

Badan Pusat Statistik berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Position, Task, Function, and Authorization of BPS-Statistics Indonesia

a. Position

BPS-Statistics Indonesia is non-departmental government agency positioned under and responsible directly to the President. BPS is led by a Director General.

b. Task

BPS is tasked to execute governmental duty in the field of statistics according to provisions made by laws and regulations.



Gambar 2.13. BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Tampak dalam gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memukul gong sebagai simbolis dimulainya kegiatan Rapat Teknis Nasional BPS.

Figure 2.13. As Non-Departmental Government Agency, BPS-Statistics Indonesia is directly responsible to the President. The picture shows President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, strike the gong to symbolize the beginning of National Technical Meeting of BPS-Statistics Indonesia.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
- 2) Penyelenggaraan statistik dasar;
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;
- 4) Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Functions

In the process of performing its duty, BPS administers the following functions:

- 1) Analysis and formulation of national policy in the field of statistical activities,
- 2) Administration of basic statistics,
- 3) Coordination of functional activities within BPS duty,
- 4) Facilitating and educating government institution activities in the field of statistical activities,
- 5) Execution of education and general administration service in the field of general planning, administration, organization and management, personnel, finance, archive, law, code system, equipment, and household.

d. Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi, BPS mempunyai kewenangan:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional; dan
- 5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik,
 - penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

2.4. Visi dan Misi BPS

a. Visi BPS

Visi Badan Pusat Statistik adalah penyedia statistik berkualitas.

b. Misi BPS

Misi Badan Pusat Statistik ada tiga, yaitu:

- 1) Menyediakan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan;
- 2) Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

d. Authorization

While executing its functions, BPS authorizations are the following:

- 1) *Formulation of macro plan in its field;*
- 2) *Formulation of policy in its field to support developmnet in macro terms;*
- 3) *Stipulation of information system in its field;*
- 4) *Stipulation and administration of national statistics; and*
- 5) *Other authorization according to effective laws and regulations, namely*
 - *formulation and implementation of certain policy in statistical activities,*
 - *compilation of manuals on implementation guidance.*

2.4. Vision and Mission of BPS

a. Vision of BPS

The vision of BPS-Statistics Indonesia is ‘BPS is quality statistics provider.

b. Mission of BPS

The vision of BPS-Statistics Indonesia are includes of three:

- 1) *To provide quality statistical information: complete, accurate, relevant, up-to-date, and continuously;*
- 2) *To improve efforts to coordinate, integrate, synchronize, and standardize statistical activities within the framework of reliable, effective and efficient National Statistical System; and*
- 3) *To improve human resource capability optimally keeping them abreast of the most recent developments in science and technology.*



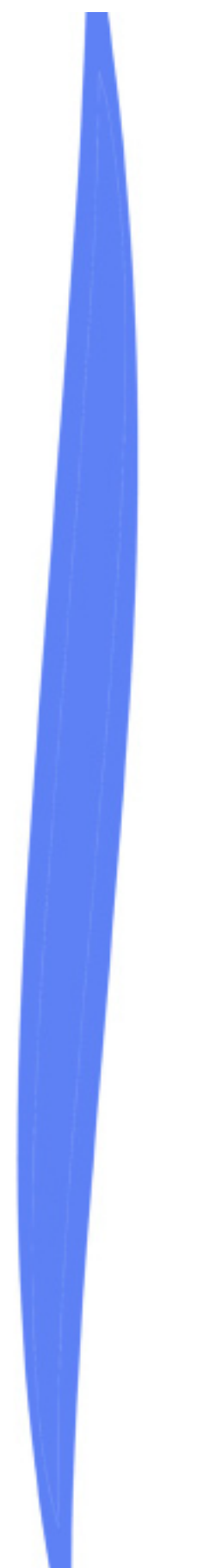
Gambar 2.14. Maket gedung BPS Pusat, Jl. dr. Sutomo No.6-8, Jakarta Pusat, yang pembangunannya direncanakan selesai pada akhir tahun 2009.

Figure 2.14. The miniature of future BPS Headquarters complex on 6-8 dr. Sutomo street, Central Jakarta, the construction of which will be completed at the end of 2009.

3

SISTEM STATISTIK NASIONAL *NATIONAL STATISTICS SYSTEM*

<http://www.bps.go.id>



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berkaitan dengan hal tersebut, statistik menjadi terasa penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan masyarakat.

Statistik dapat menjadi rujukan maupun pedoman bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan, merencanakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun regional. Statistik juga penting sebagai bahan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasi, atau memperbaiki kebijakan, rencana atau pun program pemerintah. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi dan kerja sama tersebut dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Koordinasi dan kerja sama tersebut bermaksud untuk pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, Kepala BPS telah menetapkan Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional yang ditetapkan pada tanggal 16 Pebruari 2000.

According to the Republic of Indonesia Law Number 16 Year 1997 on Statistics, statistics are any data obtained by gathering, processing, publishing, and analysis thereof, including portrayal of systems regulating inter-elements relationships in statistical undertakings. In that sense, statistics become something whose meanings are felt to be important in planning, monitoring, evaluation, and execution of various activities in every walk of life.

The government may use statistics as a reference as well as guidance in policy formulation, and planning development programs at every level: national, sectoral, and regional. Statistics are also important as an input to evaluation, confirmation, or improvement of policy, plan, or government programs. Therefore, on account of the importance of the role of statistics, in order to achieve reliable, effective, and efficient. National Statistical System steps must be taken to regulate statistical undertakings in integrative way.

BPS conducts statistical undertakings in coordination and cooperation with governmental institutions and community groups both at nasional and regional level. The coordination and cooperation are performed by anticipating and applying science and technology. Coordination and cooperation are meant to secure standardization of concepts, definitions, classifications, and measures.

As directed in Law Number 16 Year 1997, BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician has decreed BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician Decision Number 5 Year 2000 on National Statistical System issued on February 16, 2000. The intentions for establishing and

Tujuan mewujudkan dan mengembangkan SSN adalah:

- 1) Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
- 2) Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik;
- 3) Terciptanya suatu SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik, yaitu:

- 1) Aspek kebutuhan data statistik;
- 2) Saran dan pertimbangan Forum Masyarakat Statistik (FMS);
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum;
- 4) Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi (KISS) yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik baik segenap instansi pemerintah dan atau unsur masyarakat dalam mengatur dan menetapkan:
 - pembagian jenis statistik,
 - penetapan penyelenggara kegiatan statistik,
 - cara pengumpulan data yang dilakukan,
 - penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik, dan
 - pengelolaan rujukan statistik,
- 5) Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memberikan umpan balik keluaran yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan berikutnya serta untuk makin memantapkan SSN.

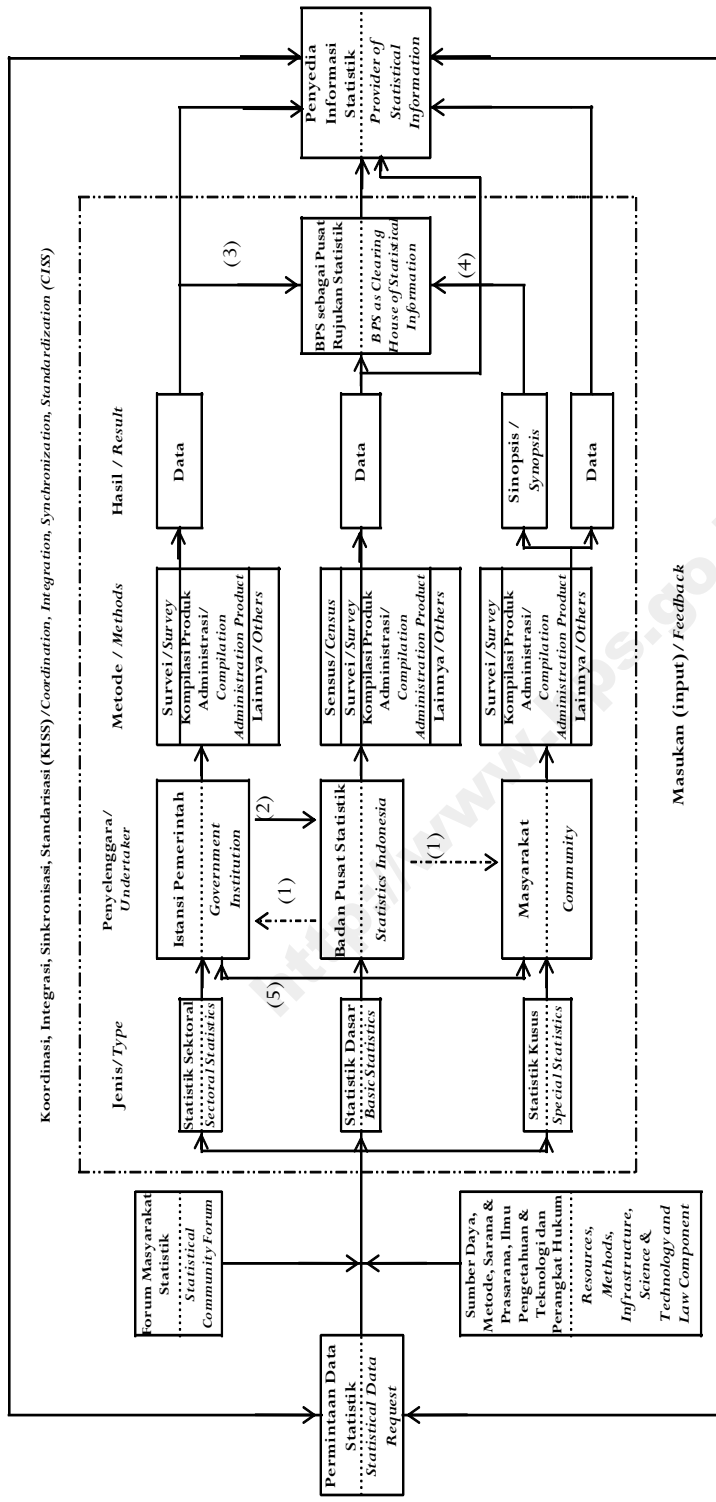
then develop National Statistical System (NSS) are as follows:

- 1) In order that all statistical activity organizers exploit the resources made available optimally;
- 2) To avoid the possibility of duplications among statistical activity organizers, and
- 3) To establish a reliable, effective, and efficient NSS.

The steps required to reach totality in statistics undertakings are:

- 1) Statistical needs aspects,
- 2) Statistical Community Forum's suggestion and consideration,
- 3) Availability of human resource and financial resource, appropriate method, adequate facilities and infrastructure, advanced science and technology, dissemination aspect of produced data, as well as completeness of legal requirement,
- 4) The aspects of coordination, integration, synchronization, and standardization agreed to by BPS and the entire organizers of statistical activities whether they are government institutions and/or the groups of community in arranging and stipulating:
 - division of works between fields,
 - who would execute what statistical activity,
 - how data collection should be carried out,
 - dissemination and usage of resulting statistics, and
 - management of statistical referral.
- 5) The aspect provision of statistical information to certain consumer groups should be in agreement with the group's requirement so the group can reciprocate with feedbacks about what output needs improvement in subsequent activities and in what way, if any, NSS can be made better than it is.

SISTEM STATISTIK NASIONAL / NATIONAL STATISTICS SYSTEM



Catatan / Notes:

- (1) BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik/BPS acts to coordinate statistical undertaking
- (2) Instansi Pemerintah menyerahkan rencana survei dan BPS memberikan rekomendasi/Government Institutions submit survey plan and BPS provides recommendation
- (3) Instansi pemerintah menyerahkan hasil ke BPS (Pusat Rujukan Statistik)/Government Institutio give the result to BPS
- (4) Masyarakat atau individu mengumpulkan sinopsis kepada BPS/Private or Community submit synopsis to BPS
- (5) Instansi pemerintah/swasta & masyarakat berkoordinasi dengan BPS/Government Institutions and private/community are coordinate and cooperated together by BPS

Gambar 3.1. Bagan Sistem Statistik Nasional
Figure 3.1. National Statistics System Structure

Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN) dapat dilihat dalam Gambar 3.1.

Sudah menjadi tugas BPS mengembangkan SSN yang mampu menghasilkan berbagai data statistik baik ditingkat nasional maupun regional secara efektif dan efisien seperti diilustrasikan pada gambar. Dalam sistem ini, BPS bertindak sebagai koordinator kegiatan statistik dan sebuah “clearing house” atau pusat rujukan statistik. Oleh karena itu, BPS bertanggung jawab untuk memberi keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa seluruh data yang dihasilkan BPS mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar, BPS memiliki berbagai sumber daya, metode yang terus diperbaharui sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana, prasarana dan perangkat hukum yang mendasari seluruh kegiatannya.

Pada sisi lain, pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada BPS. Forum ini bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. Sejalan dengan kedua sisi yang telah dijelaskan maka dilakukanlah kegiatan statistik yang dikelompokkan menjadi statistik sektoral, statistik dasar, dan statistik khusus.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik ini diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sementara itu, statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral,

Chart of National Statistics System shows on Figure 3.1.

It has become the duty of BPS to develop National Statistical System, one that is capable of yielding various types statistical data both at national and sub-national levels, like that illustrated in Figure. In this system, as figure shows, BPS acts as coordinator of statistical activities as well as a “clearing house” or a statistical referral center. Therefore, BPS is responsible for convincing the society, giving them confidence that the entire data produced by BPS can be easily accessed by any member of the community.

As illustrated in figure, BPS owns, on one hand, various kinds of resources, methods that are continuously renovated to capture developments in science and technology, facilities, infrastructures, and legal apparatus constituting the foundation of its entire activity.

On the other hand, the government establish Statistical Community Forum who provide suggestions and considerations in statistical matters to BPS. The Forum’s status is non-structural and independent, its member is consisted of governmental elements, experts, practitioners, and the society’s prominent figures. Having the supports of both of the two sides executors of statistical activities are then ready to do their respective tasks, producing statistics which are grouped into sectoral statistics, basic statistics, and special statistics.

Sectoral statistics are those produced to fulfill the statistical requirements of particular agencies in their task to execute govermental and development tasks that constitutes the primary duties of the agency in question. This kind of statistics is produced by the government agency itself.

Meanwhile, the second kind called basic statistics are those the production of which is intended to serve the statistical needs of wide users, both government and society groups, having the characteristics of being cross-sectoral, have

berskala nasional, makro. Penyelenggaraan statistik ini menjadi tanggung jawab BPS.

national coverage, and broadly aggregated. The production of this kind of statistics is the responsibility of BPS.



Gambar 3.2. Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Konsuler Kedutaan Besar Jepang (Makoto Iyori), Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia (Joachim Von Amsberg), dan Direktur Pinjaman dan Hibah Departemen Keuangan (Maurin Sitorus). Pemerintah Jepang memberikan hibah kepada BPS yang dikelola oleh World Bank yang bertujuan mendukung BPS dalam memperkuat Sistem Statistik Nasional.

Figure 3.2 *BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician (Dr. Rusman Heriawan) with Japanese Embassy Consulat (Makoto Iyori), Chief World Bank Representative (Joachim Von Amsberg), and The Director of Ministry of Finance Loan and Grant (Maurin Sitorus) after the signing of Memorandum of Understanding The Japanese Government Extended Grant to BPS, managed by the World Bank, which purpose is to support BPS in strengthening the National Statistics System.*

Statistik berikutnya disebut statistik khusus, merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi swasta, baik lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, masing-masing berkoordinasi dengan BPS. Sebaliknya, BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik kepada instansi pemerintah,

The third is called special statistics, i.e., statistics that are produced to fulfill the specific requirements of business world, education sector, socio-cultural groups, and other interests of the society's existence, the production of which is carried out by institutes, organizations, individuals, and/or other society's elements.

Special statistics are taken care of by members of the society or private sector institutes, whether in the form of organization, individual, other society's elements, independently or in cooperation with BPS. In these cases BPS acts as coordinating element between government institutions, private sector, and society members. The coordination may take several forms, one of which may be the case where

swasta, maupun masyarakat. Bentuk koordinasi tersebut seperti instansi pemerintah menyerahkan rencana survei, kemudian BPS memberikan rekomendasi.

Metode yang digunakan untuk menghasilkan data terdiri dari sensus, survei, kompilasi produk administrasi, maupun metode lainnya.

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Sementara kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat memperoleh data dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, maupun cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, BPS memperoleh data dengan cara sensus, selain ketiga cara tersebut. Berkaitan dengan sensus, statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan BPS apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.

Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah diserahkan kepada BPS. Sementara itu, dalam rangka perkembangan Sistem Statistik Nasional, penyelenggara statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada

the government institution dealing with a certain data collection hands over the survey plan, then BPS gives its recommendation.

Data collection may use different method, it can be census, survey, administrative product compilation, or other methods.

Census is a procedure of data collection conducted by enumerating all units of the population in the entire regions of the Republic of Indonesia to collect data on a small number of population characteristics at a certain point of time.

Survey is a method of data collection conducted by enumerating a sample of the population to estimate characteristics of the population at a certain point of time.

Meanwhile, administrative product compilation is a way of gathering, processing, presenting and analyzing data based on administrative records existing in government organisations and/or society.

According to the Republic of Indonesia Law Number 16 Year 1997 on Statistics, the way governmental institutions, private sector and society members obtain data is through survey, administrative product compilation, or others as permitted by the progress of science and technology. Meanwhile, BPS collects data using census, besides the three methods just mentioned. However, if a certain sectoral statistics have to be collected through census then the ministry or agency responsible for the collection of that type of data set should apply the method in cooperation with BPS.

Government institutions producing a certain sectoral statistics is obliged to surrender a copy of the results to BPS. Meanwhile, for the sake of the development of National Statistical System, special statistical executors are obliged to submit the synopsis of any statistical activities to BPS after the

BPS. Kewajiban memberitahukan sinopsis tersebut, tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

work is completed. However, the obligation to hand over the synopsis is not required in case the statistics are only used to fulfill internal requirement.



Gambar 3.3. Sebagai penyedia data, BPS senantiasa memperbaiki kualitas data yang disajikan kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai BPS sebelum melaksanakan suatu kegiatan statistik di lapangan agar setiap petugas lapangan mempunyai persepsi yang sama akan konsep dan definisi yang digunakan suatu survei. Dalam gambar terlihat Arizal Ahnaf (dua dari kanan), Deputy Bidang Statistik Sosial, dalam sebuah acara pelatihan koordinator lapangan (korlap) dan instruktur nasional (innas) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007.

Figure 3.3. As data provider, BPS always try to improve the quality data it produces among others, by training field coordinators and national instructors before they take to the field. The instructors will train field workers so that they have the same perception on the concepts and definitions used when they actually go out to collect data. the above picture shows Social Statistics Deputy, Arizal Ahnaf, (second from right), in a session of field coordinators and national instructors of health and demography survey 2007 training.

Selanjutnya BPS bertanggung jawab untuk memberi keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa data yang dihasilkan BPS mudah diakses oleh masyarakat. Namun, masing-masing penyelenggara statistik pada akhir kegiatan statistik juga berperan sebagai penyedia informasi statistik pada masing-masing kegiatan yang diselenggarakannya. Selanjutnya, pengguna data akan memberikan masukan terhadap output kegiatan statistik yang akan dipertimbangkan untuk penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan statistik berikutnya, juga bagi penyempurnaan sistem statistik nasional menuju keadaan yang semakin andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

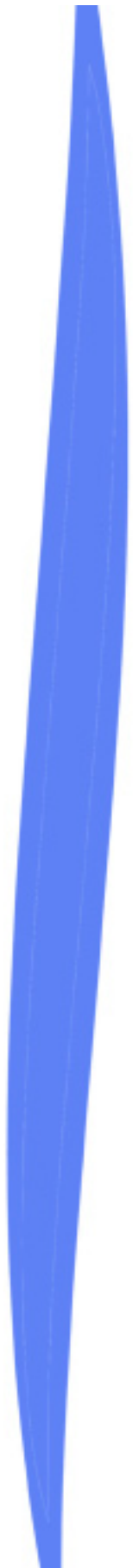
Then BPS has the responsibility to convince the society, tell them to have faith that any data produced by BPS can be easily accessed by any member of the society. Also, each of the other executors of statistical activities, at the end of the statistical activity they execute, perform the role of provider of statistical information regarding the activity they each carry out. Next, data user will give comment about the output of any statistical activity which will be put into consideration when an effort is made to improve subsequent round of that activity, also as an input into the effort to improve National Statistical System towards a more reliable, effective, and efficient state to support national development.

4

DATA STRATEGIS BPS
*STRATEGIC DATA OF
BPS~STATISTICS INDONESIA*



<http://www.bps.go.id>



Data telah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak. Tidak ada kegiatan perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi tanpa menggunakan data. Dari sekian banyak data yang disajikan BPS, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak dan bernilai strategis. BPS menyebut data jenis tersebut sebagai data strategis yang mencakup pengertian tidak ada institusi lain yang menyusun data tersebut, banyak digunakan untuk berbagai kajian, menggambarkan fenomena dan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, dan kemunculannya dinantikan berbagai pihak.

Spektrum pengguna data strategis sangat luas, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Hal ini terkait dengan sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Data strategis dalam ulasan ini mencakup: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, statistik kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP), angka produksi padi dan palawija, dan ekspor-impor.

4.1. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam Produk Domestik Bruto. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Unsur pokok dalam penghitungan PDB adalah sebagai berikut: (1) Output, merupakan nilai barang yang dihasilkan dalam suatu periode

***F**or various groups data have become a necessity. No planning, monitoring or evaluation activities would proceed without the use of data. Of the many types and varieties of data provided by BPS, there are a few set whose current publication various groups such as the government, academicians, entrepreneurs, or even general people always eagerly wait for. BPS refers to those anticipated sets of data as strategic data. The said BPS strategic data, meet at least several criteria: no other institution prepares the same data set, being used in many studies, portraying a phenomenon and even influencing socio-economic condition, and many groups anticipate its current publication.*

The spectrum of the strategic data users is very wide, starting from the government, academicians, entrepreneurs, and international circles to common people. The wide spectrum of users is in line with the nature of the data, i.e., very wide in dimension. In this report, the strategic data covered are economic growth, inflation, employment, poverty statistics, farmers' terms of trade, rice and second crops production figures, and export and import.

4.1. Economic Growth, Inflation, Employment, and Poverty

a. Economic Growth

***E**conomic growth rate shows the growth of the production of goods and services in an economic region in a given period of time. The production is measured in gross domestic product. GDP is the sum of added value produced by all business units in a country, or the total value of final goods and services produced by all economic units.*

The main elements in measuring GDP are as follows: (1) Output, defined as the value of good and services produced in a given period of time, usually

tertentu, biasanya satu tahun. Jenis output ada tiga macam, yaitu output utama (output utama produksi), output sampingan (bukan tujuan utama produksi), dan output ikutan (output yang terjadi bersama-sama/tidak dapat dihindarkan dengan output utamanya); (2) Biaya antara, merupakan barang-barang dan jasa tidak lama yang digunakan/habis dalam proses produksi; (3) Nilai tambah, terdiri dari Nilai Tambah Bruto (NTB) yang merupakan output dikurangi biaya antara yang merupakan produk dari proses produksi dan Nilai Tambah Neto (NTN) yang merupakan NTB dikurangi penyusutan.

PDB dapat dinyatakan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan (*constant price*) dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000.

Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi—tenaga kerja, tanah, modal (kapital), dan *entrepreneurship* (keahlian/kewirausahaan)—yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak mempedulikan kepemilikan faktor produksi.

Penyusunan PDB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan penggunaan atau sering disebut sebagai pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Namun, saat ini BPS menggunakan dua pendekatan pertama.

PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai rata-rata

in one year. There are three types of output, i.e., main output (the main goods and services produced), subsidiary output (goods and services that are not the main goal of production), and accompanying output (goods and services that occur inevitably together with the main output); (2) Intermediate cost, defined as non-durable goods and services that are used up in the production process; (3) added value, consisting of gross added value, which is the output minus the intermediate cost and, net added value which is formed by deducting depreciation from the gross added value.

GDP can be expressed in two price concepts, i.e., the current prices and constant prices. The rate of economic growth is calculated using the concept of constant prices with a certain base year to eliminate price changes factor. Currently, BPS uses year 2000 as the base year.

The added value is also the sum of compensation to factors of production—workforce, land, capital, and entrepreneurship (expertise/management)—that are used to produce goods and services. The economic growth measured by GDP only considers the place of production, i.e., domestic, regardless of the ownership of production factors.

The measurement of GDP can be done by applying three approaches: (a) production approach, (b) use or often called expenditure approach, and (c) income approach. Currently, BPS applies the first two approaches.

Constant prices GDP calculated based on the expenditure approach is useful in measuring the growth rate of consumption, investment, and foreign trade. Per capita current-prices GDP and GNP show the

PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai ini belum memperhatikan kesenjangan antar satu/kelompok orang dengan kelompok lainnya. Pada sisi lain, PDB dan PNB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Dalam pembahasan PDB beberapa hal yang harus diketahui adalah pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (*q to q*), merupakan PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*y on y*), PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative* (*c to c*) merupakan PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDB.

Untuk pendekatan produksi, PDB dihitung sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Untuk pendekatan pendapatan, sumber datanya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional, Indeks Harga Konsumen (IHK), realisasi belanja pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), data realisasi pengeluaran pemerintah

average GDP and GNP available per head or per person. This value has not yet to consider the gaps between one person/group and the other person/group. On the other hand, constant-prices GDP and GNP per capita is useful for assessing the real per capita economic growth of a country.

*Several other issues that is important to note when discussing GDP is the quarter-to-quarter (*q to q*) economic growth, i.e., a constant-prices GDP in one quarter compared to that of the previous quarter. Further, the year-to-year (*y on y*) economic growth is a constant-prices GDP in a certain year compared to that of the previous year. Cumulative to cumulative (*c-to-c*) economic growth is a constant-prices GDP in a certain quarter compared to the same cumulative period in the previous year.*

The source of growth is the sectors or expenditure components of GDP that generate the growth. To enable one to know the sources of growth, one must first weight the rate of economic growth by each of the sectors share or expenditure components ratios against GDP.

In production approach, GDP is calculated as the total value of goods and services produced by all economic units operating in a certain region or country in a given period of time (usually one year). In income approach, the source of data is, among others, the national socio-economic survey, consumer price index (CPI), government expenditure realization from the state budget (APBN), provincial, regency/municipality and village level governments expenditure realization

provinsi, kabupaten/kota dan desa yang dikumpulkan oleh BPS, Indeks Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, output sektor konstruksi oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Ekspor, Statistik Impor, dan Neraca Pembayaran yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. *Resultante* (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter.

Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai

compiled by BPS, general wholesale price index (WPI) excluding export and the output of the construction sector compiled by BPS Production Account Directorate, publications of large and medium industries statistics, export statistics, import statistics and balance of payment issued by Bank of Indonesia.

b. Inflation

Inflation is one of the important indicators used in providing information on the dynamics of the development of prices of goods and services consumed by the people.

Inflation means the percentage increase of prices of good and services consumed by households. The prices of some goods are rising and those of some others are constant. Oftentimes, however, the prices of some goods or services decline. The resultant of goods and services price changes in a certain period of time (monthly) is called inflation (if it is rising) or deflation (if declining).

The purpose of measuring the inflation is to get an indicator depicting the general inclination of price changes. It is important to achieve that goal because the indicator can be used as basic information in decision making both in micro and macro economic levels, in fiscal or monetary matters.

At micro level, a household/society with relatively fixed income, for example, can use the inflation rate as the basis for adjusting daily expenses. At corporate level, the inflation rate can be used to plan business purchases and contracts. In a larger scope (macro), the

untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Bahan dasar penyusunan inflasi adalah Survei Biaya Hidup. SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali dan terakhir diadakan pada tahun 2007. Secara nasional paket komoditas yang diperoleh dari hasil SBH 2007 sebanyak 774 barang dan jasa, sedangkan paket komoditas untuk 66 kota berkisar antara 284-441 jenis barang dan jasa. Selain paket komoditas, hasil SBH lainnya yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah Diagram Timbang (*Weighting Diagram*).

c. Ketenagakerjaan

Salah satu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat

inflation rate portrays the condition / stability of monetary market and the economy.

In general, the measurement of price changes is taken care of by a price index known as the consumer price index (CPI). The percentage of CPI increase is known as inflation, while the decline is called deflation. The basic material used to calculate inflation rate is price data provided by cost of living survey. This survey is conducted once in every 5-10 years and the latest one was held in 2007. At national level, the commodity package enumerated in this 2007 survey contained 774 goods and services, whereas the commodity package for 66 cities were around 284-441 kinds of goods and services. Besides the commodity package, other CLS results that are also used to calculate the inflation is the weighting diagram.

c. Employment

One important employment issues besides the economically-active population and work force structure, is unemployment. From economic point of view, unemployment is a product of the inability of employment market to absorb the available work force. Relatively limited employment opportunities will leave job seekers whose numbers keep increasing every year as population size grows unable to find works. High rate of unemployment creates problems not only in economic sector, but also in social sector, for example, poverty and social vulnerability.

Data on work force situation is one of the principal data that can describe the people's

menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Sumber data yang digunakan antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan salah satu survei pendekatan rumah tangga yang khusus mengumpulkan data ketenagakerjaan secara periodik (Februari dan Agustus).

Konsep dan definisi yang digunakan BPS (dalam Sakernas) mengacu pada konsep yang berlaku secara internasional (*ILO Concept Approach*). Hal ini bertujuan untuk menjamin keterbandingan antar negara. Penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, namun dalam survei dicatat 10 tahun ke atas.

Definisi standar untuk pengangguran ialah seseorang yang berusia kerja dan merupakan angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup: (1) sedang mencari pekerjaan, (2) sedang mempersiapkan usaha, (3) tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran setengah merupakan keadaan dari seseorang yang telah bekerja, tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Keadaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengangguran terpaksa, mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain (*visible underemployment*). Berikutnya pengangguran sukarela, mereka yang bekerja di bawah 35 jam

economic and social conditions, and even the welfare level in a certain region within a given period of time.

The sources of data used are, among others, population census (SP), national socio-economic survey (Susenas), and national employment survey (Sakernas). Sakernas is a household approach survey that specifically gathers data on work force periodically (February and August).

The concepts and definitions used by BPS for Sakernas are the same as those applied internationally (ILO Concept Approach). The purpose for doing that is to facilitate data comparisons between countries. The age limit of economically active population applied in Indonesia is 15 years and above, although in the survey the limit is set at 10 years and above.

The standard definition for unemployed is persons whose age are within that of the work force's (15 years and above) but unemployed, who may be (1) searching for work, (2) preparing to run a business, (3) not searching for work because it seems impossible to get one (in despair), or not looking for work because already get one but is yet to start working. Half of the unemployed are those who had worked previously but quit due to unsatisfactory job.

They can be classified into two groups, i.e., (i) forced unemployment, which covers those who worked less than 35 hours per week and still looking for work or still willing to take other works (underemployment) and (ii) voluntarily unemployment, which covers those who worked less than 35 hours per week but not looking for another

per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sering juga disebut *part time worker*).

d. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Definisi umum kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini juga digunakan oleh negara-negara lain seperti: Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Siera Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar.

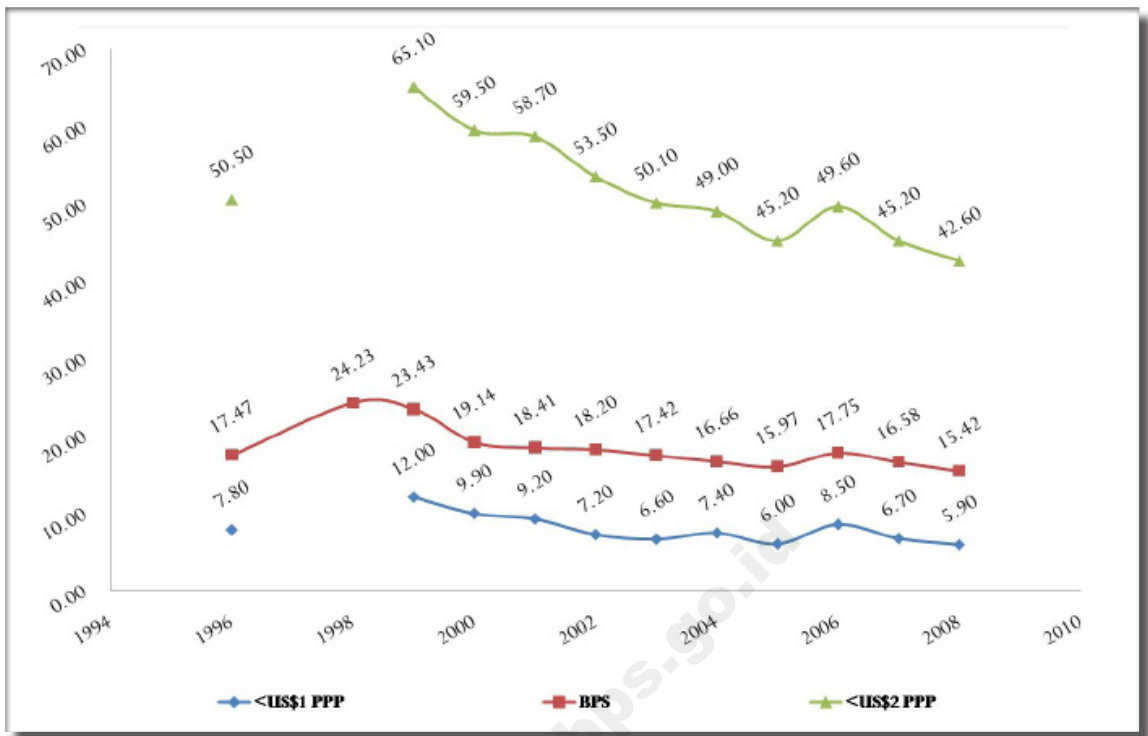
work and unwilling to take other works (often referred to as part-time workers).

d. Poverty

*P*overty is one of the basic problems that has become the government's main concern in any country. One important aspect of providing support to poverty management strategy is to make available accurate and target-oriented poverty data. A proper poverty data can be used to evaluate government policy success against poverty, to compare level of poverty over time and between regions, as well to determine targeted poor inhabitants whose conditions are intended to be improved.

Poverty is generally defined as a condition where individuals or groups of people are unable to fulfill their basic rights to maintain and develop a prestigious life. Among the basic rights are the fulfilment of the need for food, health, education, employment, housing, clean water, land, natural resources and environment, secure feeling from harsh treatments and threats, as well as the right to participate in social and political life.

Poverty measurement undertaken by BPS uses the basic needs approach. This concept is also applied in many countries, including Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Siera Leone, and Gambia. By this approach, poverty is seen as the inability to satisfy food and non-food basic needs measured in terms of expenses. In other words, poverty is seen as the inability, from economic point of view, to fulfill the needs for food or non-food, considered as basic needs.



Gambar 4.1. Persentase penduduk miskin tahun 1996-2008 berdasarkan kriteria BPS dan Bank Dunia (US\$1 pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP), dan US\$ 2 PPP).

Figure 4.1. Percentage of population below the poverty line, 1996-2008 referred to BPS and World Bank (US\$1 Purchasing Power Parity (PPP), and US\$ 2 PPP).

Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

According to this approach, poor inhabitants are persons whose average monthly per capita expenses fall below the poverty line (Garis Kemiskinan / GK). Technically, poverty line is drawn by combining two components, namely, food poverty line (garis kemiskinan makanan / GKM) and non-food poverty line (garis kemiskinan non-makanan / GKNM). GKM is the expenditure value on the minimum food needed, which contains energy equivalent to 2,100 kilo calories daily per capita; while GKNM is the minimum requirements for housing, clothing, education and health.

Penduduk miskin dapat juga dihitung melalui pendekatan lain, seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menghitung jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita setara dengan US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli).

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

Di samping data kemiskinan yang dihitung dari data Susenas (data kemiskinan makro), BPS juga mengeluarkan data rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) untuk keperluan bantuan langsung tunai (BLT), yang juga disebut sebagai data kemiskinan mikro.

Pada tahun 2008, terkait program BLT, mengacu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008, tugas BPS adalah menyediakan data RTS. *Updating* pendataan ini dilakukan pada

Poor inhabitants of the world can also be counted by another approach, such as that applied by the World Bank, who counted the number of poor inhabitants based on per capita expenditure equivalent to US\$ 1 and US\$ 2 PPP (purchasing power parity).

BPS estimated for the first time the number and percentage of poor inhabitants in 1984. At that time, the estimation, which was based on the consumption module data of national socio-economic survey, covered the period of 1976–1981. Since then, every three years, BPS issues data on the number and percentage of poor inhabitants regularly, disaggregated by rural and urban areas.

Lately, starting 2003, BPS has even issued data on the number and percentage of poor inhabitants annually. This improvement was made possible because, since 2003, BPS decided to collect national socio-economic survey consumption panel data every February or March each year. As supplementary information, results of basic need commodities package survey (survey paket komoditi kebutuhan dasar/SPKKD) are also utilized to estimate the proportion of spending on each of the basic non-food commodities.

Beside poverty data estimated using Susenas data (macro-poverty data), BPS also issues target households data (rumah tangga sasaran/RTS), based on the results of the 2005 People's Social and Economic Data Collection (PSE05) for the purpose of providing direct cash aid (Bantuan Langsung Tunai/BLT), also referred to as micro-poverty data.

Related to BLT program, in 2008, BPS was tasked to provide RTS data, as stipulated in the Presidential Instruction (Inpres) No. 3 of 2008. The repeat of the PSE05 was carried

tahun 2008 dalam kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08). Data ini selanjutnya dapat digunakan untuk penentuan RTS dan target individu dalam program-program perlindungan sosial seperti program bantuan langsung tunai, program bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin), program reforma agraria, dan sebagainya.

4.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani. Lebih jauh, NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan harga yang dibayar petani (I_b). NTP yang terakhir menggunakan tahun dasar 2007, menggantikan tahun dasar 1993 yang sebelumnya digunakan.

NTP lebih besar dari 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Sementara itu, NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Manfaat NTP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dari indeks harga yang diterima petani, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

out in 2008 with a new name: the 2008 Social Protection Data Collection Program (PPLS08). The data resulting from the survey was subsequently utilized to compile RTS data and individual targets for social protection programs, such as the Direct Cash Aid Program, Rice Aid for Poor Program, Agrarian Reform Program, etc.

4.2. Farmer's Terms of Trade

Farmers' terms of trade (NTP) is a proxy indicator for farmers' welfare. Furthermore, NTP is the ratio between price index of the items received by farmers (I_t) and the price index of items they paid for (I_b). The latest NTP used was one utilizing 2007 as base year, replacing the former NTP that used 1993 as base year.

When NTP value is greater than 100 it means that farmers gain. Their product prices increases more than the increase in the prices of the goods they consume. Farmers' income is greater than their expenditure. If NTP is equal to 100 it means that farmers are in a break even point. The percentage increase/decrease of their product prices is equal to the percentage increase/decrease in prices of the goods they consume. Farmers' income is equal to their expenditure. Meanwhile, when NTP is less than 100 it means that farmers suffer a loss. The percentage increase in their product prices is relatively small compared to the percentage increase in the prices of their consumption. Farmers' income decreases, their incomings are less than their outgoings.

Some benefits of NTP are listed below:

- 1) *Price fluctuation of goods produced by farmers can be monitored based on price index received by farmers. This index can also be utilized as a supporting data in the estimation of income from agricultural sector.*

- 2) Dari indeks yang dibayar petani, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian, perkembangan I_b juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- 3) NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk dan konsumsi rumah tangga.
- 4) Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

NTP dihitung setiap bulan dan diumumkan setiap awal bulan dalam Berita Resmi Statistik pada saat jumpa pers. Cakupan subsektor dalam NTP ini adalah tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura, tanaman perkebunan rakyat (TPR), peternakan dan perikanan.

4.3. Produksi Padi dan Palawija

Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penghitungan produksi padi dan palawija secara nasional dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Departemen Pertanian (Deptan) untuk melaksanakan cara penghitungan produksi tanaman pangan yang sama agar diperoleh hasil yang seragam sehingga dapat digunakan secara nasional. BPS bertugas sebagai koordinator.

Tata cara pengumpulan, pengolahan dan penghitungan produksi padi dan palawija yang digunakan saat ini secara nasional mengacu

- 2) *Price fluctuation of goods consumed by farmers, the largest part of rural inhabitants, and the fluctuation of price of goods needed to produce agricultural products can be monitored based on price index paid by farmers (I_b). The development of I_b can illustrate the development of inflation in rural areas.*
- 3) *NTP can be utilized to measure the exchange capability of farmers' products against household consumption.*
- 4) *NTP value shows the competitiveness level of agricultural products compared to other products. Hence, the efforts to specialize products and the attempts to increase the quality of agricultural products is worth considering.*

NTP is calculated monthly and published in beginning of every month in Official Statistical News (Berita Resmi Statistik) during press conferences. The sub-sectors covered in NTP calculation include food crops (rice and second crops), horticultures, traditional plantations (tanaman perkebunan rakyat/TPR), animal husbandries and fisheries.

4.3. Rice and Second Crops Production

Data on production of food crops (rice and secondary crops) are indicants of national supply of food. National rice and second crops production are measured by BPS in cooperation with the Ministry of Agriculture, both use the same method in order to achieve consistent and accurate results that can be used nationally. BPS acts as the coordinator.

The procedures for collecting, analyzing the data and estimation of the productions of rice and second crops that are currently applied

pada Buku Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan yang telah disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik dan Departemen Pertanian Tahun 2007. Data pokok tanaman padi dan palawija yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar) yang selanjutnya digunakan untuk penghitungan produksi.

Produksi padi atau palawija merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (hasil/hektar). Data pendukung lainnya yang juga dikumpulkan antara lain adalah luas puso/rusak, luas tanam dan luas baku lahan sawah.

Pengumpulan data luas tanam/panen dilakukan setiap bulan oleh Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) melalui Survei Pertanian (SP). Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data luas panen di tingkat kecamatan tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data dari seluruh desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Pengumpulan data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi dan palawija dilakukan melalui Survei Ubinan. Periode pengumpulan data dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) dengan petugas lapangan adalah Mantri Statistik/Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan KCD.

Dalam satu tahun, data produksi padi dan palawija disajikan sebanyak (lima) kali dengan status angka yang berbeda, yaitu angka ramalan I (ARAM I), angka ramalan II (ARAM II), angka ramalan III (ARAM III), angka sementara (ASEM), dan angka tetap (ATAP).

nationally are based on the "Manual of Data Collection and Analysis of Food Crops" (Buku Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan) that has been improved by BPS and Department of Agriculture in 2007. The primary data items collected are harvested area and productivity (yield per ha), both of which are later on used to estimate production.

Production of both rice and second crops are each obtained by multiplying area harvested and the respective productivity (yield/ha). Other supporting data items collected are, among others, the size of damaged area, the planted area, and net area of paddy fields (luas baku lahan sawah).

Planted/harvested area data are collected monthly by sub-district agricultural staff or head of sub-district agriculture branch office (Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan/KCD) through agricultural survey (survey pertanian/SP). Data collection is performed using sub-district area approach (kecamatan based) all over Indonesia. The harvested area figure at sub-district level is obtained by summing up data collected from all villages within the sub-district.

Productivity data on rice and second crops are collected through plot survey (survei ubinan) every four months (sub-round), the field work is undertaken by BPS sub-district staff (koordinator statistik kecamatan/KSK) in cooperation with KCD.

Over a span of a year, the production data of rice and second food crops are released five times, each issue with different status, namely, forecast figure I (angka ramalan I/ARAM I), forecast figure II (angka ramalan II/ARAM II), forecast figure III (angka ramalan III/ARAM III), temporary figure (angka sementara/ASEM), and permanent figure (angka tetap/ATAP).

Tabel 4.1. Data Realisasi dalam ARAM I, II, III, serta ASEM dan ATAP Produksi Padi/Palawija
 Table 4.1. Data on the Realization of Rice/Staple Food Crops Production in ARAM I, II, III and ASEM, ATAP

Status Angka <i>Status of Value</i>	Subround			Keterangan <i>Note</i>
	Januari-April <i>January-April</i>	Mei-Agustus <i>May-August</i>	September-Desember <i>September-December</i>	
ARAM I	Ramalan/ <i>Estimation</i>			Disajikan awal Maret tahun berjalan/ <i>Presented early March on the corresponding year</i>
ARAM II		Ramalan/ <i>Estimation</i>		Disajikan awal Juli tahun berjalan/ <i>Presented early July on corresponding year</i>
ARAM III			Ramalan/ <i>Estimation</i>	Disajikan November tahun berjalan/ <i>Presented November on corresponding year</i>
ASEM	Realisasi (belum final)/ <i>Realization (not final yet)</i>			Awal Maret tahun berikutnya berbarengan ARAM I tahun berjalan/ <i>Early March the following year, at the same time with ARAM I on corresponding year</i>
ATAP	Realisasi (final)/ <i>Realization (final)</i>			Awal Juli tahun berikutnya berbarengan ARAM II tahun berjalan/ <i>Early July the following year, at the same time with ARAM II on corresponding year</i>

4.4. Ekspor dan Impor

Data ekspor-impor berguna bagi pemerintah, swasta, dan perorangan. Bagi pemerintah, data tersebut dapat membantu proses perumusan kebijakan maupun untuk memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, data tersebut dipakai pula untuk menyusun Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (BOP). Bagi swasta dan perorangan, statistik ekspor-impor dapat dipakai untuk analisis ekonomi dan sosial. Data ekspor-impor barang dan jasa juga berguna untuk mengetahui pola arus perdagangan internasional.

4.4. Export and Import

Export and import data are useful to the government, private sectors and individuals. To the government, the data are useful as input into the formulation of a certain policy as well as in monitoring economic performance. Aside from that, the data are also used in the compilation of gross domestic product (GDP) and balance of payment (BOP). To private sectors and individuals, export and import statistics are useful for economic and social analysis.

Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut.

Ada beberapa barang/komoditi yang tidak termasuk dalam statistik ekspor, seperti pakaian, barang pribadi dan perhiasan milik penumpang yang berpergian ke luar negeri; barang-barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; barang-barang untuk ekspedisi/pameran; peti kemas untuk diisi kembali; uang dan surat-surat berharga; serta barang-barang untuk contoh.

Sementara yang dimaksud dengan impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut.

Barang/komoditi yang tidak termasuk dalam statistik impor, seperti pakaian dan barang-barang perhiasan milik penumpang; barang-barang untuk dipakai sendiri kecuali lemari es, TV, d.s.b.; barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan suatu negara; barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksibisi/pameran; pembungkus/peti kemas; uang dan surat-surat berharga;

Pencatatan statistik ekspor-impor oleh BPS berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh *United Nations Statistical Division (UNSD)*, yaitu: *International Merchandise Trade Statistics: Concept and Definitions (IMTS series M No.52 Rev.2, 1998, United Nations)* sehingga data statistik ekspor/impor tersebut bisa dibandingkan secara internasional.

Export of goods is the sum of all goods brought out of one country both for commercial and non-commercial purposes (for example grants, donation, gifts), as well as goods brought out to be processed outside the country but the resulting product is to be brought back into the country.

The items excluded from export statistics are clothes, personal belongings and jewelry owned by passengers travelling overseas, items sent to representative of the country overseas, items to be used in expedition or exhibition, container to be re-filled, money and valuable papers, and sample goods.

Meanwhile, meant by import of goods is the activity of sending items into one country territory, both for commercial and non-commercial purposes, including items to be processed inside one country but the output is to be sent back to the original country.

Items or commodities excluded from import statistics are clothes, personal jewelry of passengers, personal consumption items, except refrigerator, television, etc., items sent for use of another country's representative, items for expedition/scientific research and exhibition, packages/container; and money and valuable papers.

BPS records export and import statistics in accordance to the regulation issued by the United Nations Statistical Division (UNSD), i.e., International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definition (IMTS series M No. 52, Rev.2, 1998, United Nations), so that the export and import statistics compiled by BPS are internationally comparable.

Semua barang-barang yang masuk atau keluar dari batas-batas kepabeanan (*custom area*) Indonesia harus dicatat oleh Pabean dalam hal ini Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Statistik ekspor-impor disusun berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang berisi informasi kinerja perdagangan internasional suatu negara dalam bentuk volume dan nilai yang dirinci menurut komoditi, negara tujuan/asal, dan pelabuhan muat/bongkar, diterima BPS dari seluruh KPBC di Indonesia. Kewajiban KPBC untuk mengirim langsung lembar-lembar tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/KMK-05/1997 tanggal 10 Maret 1997.

Statistik ekspor-impor disajikan secara rutin bulanan, dirinci menurut migas dan non migas, negara tujuan/asal, pelabuhan muat/bongkar, dan komoditi/kelompok komoditi dalam berbagai klasifikasi.

Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan sistem perdagangan umum (*the general trade system*), seluruh barang yang keluar-masuk ke wilayah Indonesia dinyatakan sebagai barang ekspor-impor. Sementara statistik impor menggunakan sistem perdagangan khusus, ada wilayah tertentu dianggap sebagai luar negeri sehingga barang yang masuk ke wilayah tersebut belum dinyatakan sebagai impor, seperti kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (*Free Trade Zone*) dan Kawasan Berikat. Namun sejak Januari 2008, pencatatan statistik impor juga menggunakan sistem perdagangan umum. Pencatatan nilai statistik ekspor menggunakan *Free on Board* (FOB) sedangkan impor menggunakan *Cost Insurance and freight* (CIF).

All goods coming in or going out of the Indonesian custom areas should be recorded by the custom offices, in this case the office of duty and excise service (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai /KPBC). Export and import statistics are compiled based on Report on Export Goods (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) and Report on Import Goods (Pemberitahuan Impor Barang/PIB) documents that contain the information on international trade performance of a country in the form of volume and value broken down by commodities, country of destination/origin, and port of loading/unloading, sent to and received by BPS from KPBC all over Indonesia. KPBC obligation to directly send the document pages is based on the Decree of Financial Minister (Surat Keputusan Menteri Keuangan) No: 101/KMK-05/1997 (dated 10 March 1997).

Export and import statistics are presented monthly, oil and non-oil separated, and diagggregated by country of origin/destination, port of loading/unloading, and commodities/groups of commodities in various classifications.

The recording system of export statistics is implemented using the general trade system, i.e., all items coming in and going out of Indonesian territory are declared as export or import items. Meanwhile, the recordings of import statistics is carried out based on the special trade system, by which some places are considered as overseas, such as free trade zone of Batam, Bintan and Karimun and bounded zone, so that all items going into those places are yet to be considered as import. However, beginning January 2008, the recording of import statistics also uses the general trade system. The recording of export statistics applies free on board (FOB) values, while that of import statistics uses cost of insurance and freight (CIF) values.

5

KEGIATAN STATISTIK BPS *BPS STATISTICAL ACTIVITIES*

<http://www.bps.go.id>



Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS berusaha memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi maupun sosial, seperti: pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, perdagangan, kependudukan, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, dan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik menyatakan bahwa kegiatan statistik ditujukan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

5.1. Pengumpulan Data

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Sensus

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, pasal 1 ayat 8 mendefinisikan sensus sebagai cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun oleh BPS yang meliputi:

- 1) Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 0 (nol);
- 2) Sensus Pertanian yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (tiga); dan
- 3) Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6 (enam).

Pencacahan dalam Sensus Penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik

In doing its statistical activities, BPS tries to fulfill the government's data requirements both in social and economic area such as agriculture, mining, industry, communication, commerce, society, employment, finance, education and national income.

Law Number 16 Year 1997 on Statistics states that statistical undertakings are intended to provide complete, accurate, and up-to-date statistical data in order to achieve reliable, effective, and efficient National Statistical System to support national development.

5.1. Data Collecting

Statistical undertaking usually begins with data collection utilizing a certain method:

a. Census

Law Number 16 Year 1997, article 1 Verse 8 defines census as procedure for collecting data by enumerating all population units in the entire region of the Republic of Indonesia to obtain data on a few characteristics of the population at a certain point of time. A census is executed at least once in ten years by BPS; there are three types:

- 1) Population Census, undertaken in the 0 (zero) ending years;
- 2) Agricultural Census, undertaken in the 3 (three) ending years; and
- 3) Economic Census undertaken in the 6 (six) ending years.

In a population census enumeration is conducted to collect data on fundamental and

pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tunawisma, anak buah kapal Indonesia, manusia/orang perahu, dan suku terasing). Karakteristik pokok dan rinci tersebut mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan BPS pada tahun 2000, dengan desain untuk pencacahan lengkap terhadap perumahan (12 karakteristik) dan penduduk (15 karakteristik). Sensus Penduduk berikutnya akan dilaksanakan pada 2010 mendatang.

Sensus Pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian. Karakteristik pokok dan rinci tersebut mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman, kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

Sensus Ekonomi ditujukan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi (kecuali pertanian) di seluruh wilayah Indonesia, baik yang diusahakan secara permanen maupun tidak permanen termasuk pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan industri jasa. Karakteristik pokok dan rinci tersebut mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

detailed characteristics of the entire citizen, whether they live in permanent residences or temporary or moving ones (those of the homeless, Indonesian crew of ships, boat people, and isolated tribes). The fundamental and detailed characteristics include the characteristics of persons, housing and its environment, and other characteristics belonging to basic statistics in the field of population. The last population census was held by BPS in the year 2000, with a complete count design for housing (12 characteristics) and persons (15 characteristics). The next population census will be held in 2010.

Agricultural census is conducted to collect data on fundamental and detailed characteristics from all farmers, agricultural enterprises, and other agricultural statistics objects. The fundamental and detailed characteristics include those of farmers, land, crop, business activities in agriculture area, and other characteristics belonging to basic statistics in the field of agriculture.

Economic census is intended to collect data on fundamental and detailed characteristics of the entire companies and economic business activities (except agriculture) residing in entire regions of Indonesia, operated permanently or temporarily in the field of mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and clean water, building and construction, trade, restaurant and hotel, transportation and communications, finance, rental and corporate service, and industrial service. The fundamental and detailed characteristics include business activities, labor absorption, production, raw material usage, and other characteristics belonging to basic statistics in economic field.

b. Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu obyek pada saat tertentu (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, pasal 1 ayat 9). Badan Pusat Statistik melaksanakan survei antar sensus yaitu survei yang dilakukan di antara dua sensus sejenis. Survei antar sensus tersebut meliputi Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas), dan Survei Ekonomi Antar Sensus (Setas).

Survei sektoral dan lintas sektoral merupakan survei bebas yang tidak berkaitan dengan salah satu sensus. Namun demikian, survei-survei jenis ini dilaksanakan secara berkala dengan kurun waktu beberapa tahun, tahunan, atau kurang dari setahun, tergantung pada kecepatan perubahan data dan keperluan perencanaan.

Berbagai survei sektoral diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Industri, Survei Pertanian, Survei Pendapatan Petani dan Struktur Ongkos Usaha Tani, Survei Koperasi Unit Desa (KUD), Survei Harga Konsumen, dan Survei Harga Produsen.

Sedangkan jenis survei lintas sektor di antaranya adalah Survei Khusus Tabel Input-Output (SKIO), Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR), Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU), Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR), dan Survei Khusus Pembentukan Modal (SKPM).

c. Studi Khusus

Studi khusus dilaksanakan guna mempelajari berbagai aspek kegiatan

b. Survey

A survey is a procedure of data collecting through the enumeration of a sample of the population to estimate the characteristics of an object at a certain point of time (Law Number 16 Year 1997, article 1 verse 9). BPS-Statistics Indonesia implements intercensal surveys, i.e., surveys conducted between two censuses. There are intercensal surveys namely Population Intercensal Survey, Agricultural Intercensal Survey, and Economic Intercensal Survey.

Sectoral and cross-sectoral surveys are independent surveys, i.e., they are not related to any census. Nevertheless, surveys of these types take place periodically: once in several years, yearly, or more often, depending on the swiftness of situational change or planning requirement.

Among the sectoral surveys are National Socioeconomic Survey, National Labor Force Survey, Cost of Living Survey, Village Potential Survey, Industrial Survey, Agricultural Survey, Farmers Income and Cost Structure Survey, Villages Cooperatives Survey, Consumers Price Survey and Producers Price Survey.

Whereas examples of cross-sectoral surveys are special survey for Input-Output Table, Saving and Domestic Investment Special Survey, Quarterly Survey of Business Activity, Special Survey of Regional Income, and The Special Survey of Capital Formation.

c. Special Studies

Special studies are carried out with the objective to investigate various aspects

statistik untuk memberi masukan bagi pengumpulan data statistik yang baru atau penyempurnaan metode yang sudah ada sebelum diimplementasikan secara nasional. Studi khusus juga diselenggarakan untuk memenuhi permintaan data yang lebih spesifik, misalnya Studi Khusus Konsumsi Makanan Jadi.

d. Kompilasi Produk Administrasi

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, pasal 1 ayat 10). Sesuai amanat undang-undang tersebut, BPS mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan atau swasta yang mengelola catatan administrasi dari suatu kegiatan.

Contoh hasil dari kompilasi produk administrasi antara lain data ekspor barang dan jasa yang memanfaatkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), impor barang dan jasa yang memanfaatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), data statistik wisatawan mancanegara, data tentang iklim, polusi, penyakit, dan luas panen.

5.2. Cakupan Kegiatan Statistik

Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar mengamanatkan bahwa kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh BPS.

Statistik bidang ekonomi mencakup statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan

of certain statistical activities to provide inputs to a new data collection activity, or to improve existing methods before they are implemented at a national scale. Special studies can also be carried out to fulfil more specific data requirement, for example, the special study on the consumption of prepared food.

d. Compilation of Administrative Records

Compilation of administrative records is the procedure of gathering, processing, publishing, and analyzing data on administrative records existing in government and or society files (Law Number 16 Year 1997, article 1, verse 10). The Law suggests that BPS works with other governmental institutions and/or private sector organisations keeping administrative records of each of their activities.

Examples of administrative records compilation are, among others, export of goods and services data are the result of compiling Export Goods Notification documents, goods and services import data are the result of compiling import for consumption notification documents, data on Foreign Countries Tourists Statistics, data on climate, pollution, disease, and harvested area.

5.2. Scope of Statistical Activity

BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician Decree Number 6 Year 2001 on Basic Statistical Management commends that BPS carry out statistical activities in the field of economic, people's welfare, and other fields, of which the variety and type will still be developed by BPS.

In the field of economic the coverage includes agricultural statistics, industrial statistics, service and commerce statistics, financial and price statistics, and

dan harga, dan statistik lintas sektor yang dikumpulkan melalui:

- 1) Sensus Ekonomi (SE);
- 2) Sensus Pertanian (ST);
- 3) Survei Biaya Hidup;
- 4) Survei Ekonomi Antar Sensus (Setas);
- 5) Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas);
- 6) Survei Perusahaan Berbadan Hukum Sektor Perdagangan dan Angkutan;
- 7) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ekonomi;
- 8) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Pertanian;
- 9) Survei Statistik Harga Konsumen;
- 10) Survei Statistik Harga Perdagangan Besar;
- 11) Survei Statistik Harga Produsen Gabah;

cross-sectoral statistics whose data are collected through the following procedures:

- 1) *Economic Census;*
- 2) *Agricultural Census;*
- 3) *Living Cost Survey;*
- 4) *Intercensal Economic Survey;*
- 5) *Intercensal Agriculture Survey;*
- 6) *Survey of Corporations in Trade and Transportation Sectors;*
- 7) *National Socio-Economic Survey, Economic Module;*
- 8) *National Socio-Economic Survey, Agriculture Module;*
- 9) *Statistical Survey of Consumer Prices;*
- 10) *Statistical Survey of Wholesale Prices;*
- 11) *Statistical Survey of Unshelled Rice Producer Price;*



Gambar 5.1. Sensus Ekonomi diselenggarakan pada tahun berakhiran enam. Tujuannya untuk memperoleh data dasar tentang jumlah dan jenis kegiatan ekonomi/perusahaan (kecuali pertanian).

Figure 5.1. *Economic Census is undertaken in 6-ending years. It is intended to obtain basic data on the number and kinds of economic activities/enterprises (except agriculture).*

- 12) Survei Statistik Harga-harga di Pedesaan;
- 13) Survei Statistik Industri Karet Remah;
- 14) Survei Statistik Investasi;
- 15) Survei Statistik Keuangan Daerah;
- 16) Survei Statistik Lembaga Keuangan;
- 17) Survei Statistik Perkebunan Besar;

- 12) *Statistical Survey of Rural Prices;*
- 13) *Statistical Survey of Crumb Rubber Industries;*
- 14) *Statistical Survey of Investment;*
- 15) *Statistical Survey of Regional Finance;*
- 16) *Statistical Survey of Financial Institutions;*
- 17) *Statistical Survey of Large Scale Plantations;*

- 18) Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 19) Survei Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
 - 20) Survei Statistik Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HIT);
 - 21) Survei Statistik Perusahaan Industri Besar/ Sedang;
 - 22) Survei Statistik Perusahaan Konstruksi;
 - 23) Survei Statistik Perusahaan Listrik, Gas, dan Air Minum;
 - 24) Survei Statistik Perusahaan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - 25) Survei Statistik Perusahaan Pertambangan dan Penggalan;
 - 26) Survei Statistik Perusahaan Peternakan dan Rumah Pematangan Hewan (RPH);
 - 27) Survei Statistik Potensi Desa;
 - 28) Survei Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel;
- 18) *Statistical Survey of Horticulture and Food Crop Agriculture;*
 - 19) *Statistical Survey of Companies holding Forest Exploitation Rights;*
 - 20) *Statistical Survey of Industrial Crop Forest Companies;*
 - 21) *Statistical Survey of Medium/Large Scale Industries;*
 - 22) *Statistical Survey of Construction Companies;*
 - 23) *Statistical Survey of Electricity, Gas, and Drinking Water Companies;*
 - 24) *Statistical Survey of Fishery Companies and Fish Auction Places;*
 - 25) *Statistical Survey of Mining and Quarrying Enterprises;*
 - 26) *Statistical Survey of Animal Husbandry Companies and Slaughterhouses;*
 - 27) *Statistical Survey of Village Potentiality;*
 - 28) *Statistical Survey Hotel Occupation Rates;*



Gambar 5.2. Sensus Pertanian merupakan salah satu kegiatan besar BPS yang rutin dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Sensus Pertanian pertama dilaksanakan pada tahun 1963. Selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan mengambil tahun yang berakhir tiga. Sensus Pertanian 2003 adalah yang kelima dilaksanakan oleh BPS. Tampak dalam gambar seorang wanita yang sedang bertani (kiri) dan petugas pencacah Sensus Pertanian sedang melakukan wawancara dengan seorang petani di sawah (kanan).

Figure 5.2. *Agricultural Census is one of grand activities of BPS which regularly held since independence of Indonesia. First Agricultural Census was held on 1963. Later, this census regularly administered once in ten years in the 3-ending year. Picture shows a woman farmer was cultivating (left) and an enumerator was interviewing a farmer in the field (right).*

- 29) Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian;
- 30) Survei Susut Pascapanen;
- 31) Survei Usaha Tidak Berbadan Hukum Terintegrasi (Susi);
- 32) Survei Volume Penjualan Eceran Beras;
- 33) Kompilasi Data Statistik Ekspor;
- 34) Kompilasi Data Statistik Impor;
- 35) Kompilasi Data Statistik Komunikasi;
- 36) Kompilasi Data Statistik Pariwisata;
- 37) Kompilasi Data Statistik Perhubungan Laut dan Pengapalan Barang;
- 38) Kompilasi Data Statistik Perhubungan Udara;
- 39) Penyusunan Neraca Arus Dana; dan
- 40) Penyusunan Neraca Sosial Ekonomi Nasional.
- 41) Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional dan Regional (PDB dan PDRB);
- 42) Penyusunan Tabel Input-Output Nasional dan Regional;

Statistik bidang kesejahteraan rakyat (kesra) mencakup statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik sosial ekonomi nasional, dan statistik lintas sektor yang dikumpulkan melalui:

- 1) Sensus Penduduk (SP);
- 2) Survei Penduduk Antar Sensus (Supas);
- 3) Kompilasi Data Hasil Registrasi Penduduk;
- 4) Survei Penduduk/Demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi);
- 5) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
- 6) Survei Statistik Upah Buruh (SUB);
- 7) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Inti;
- 8) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul demografi dan kesra;
- 9) Survei Statistik Perumahan dan Permukiman;
- 10) Survei Potensi Desa (Podes);
- 11) Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup;
- 12) Kompilasi Data Statistik Kesehatan;
- 13) Kompilasi Data Statistik Pendidikan; dan
- 14) Kompilasi Data Statistik Kriminal.

- 29) *Cost-structure Survey of Agricultural Enterprises;*
- 30) *Survey Post-Harvest Loss;*
- 31) *Integrated Survey of Unincorporated Companies;*
- 32) *Survey of Volume of Retail Sale of Rice;*
- 33) *Compilation of Export Statistics;*
- 34) *Compilation of Import Statistics;*
- 35) *Compilation of Communication Statistics;*
- 36) *Compilation of Tourism Statistics;*
- 37) *Compilation of Statistics on Sea Transportation and Cargo Shipping;*
- 38) *Compilation of Air Transport Statistics;*
- 39) *Compilation of Flow of Fund Accounts;*
- 40) *Compilation of Socio-Economic Accounts.*
- 41) *Compilation of National and Regional Income;*
- 42) *Compilation of National and Regional Input-Output Tables;*

Statistical of area of people's welfare include population and employment statistics, national socio-economic statistics, cross-sectoral statistics whose data are collected by way of the followings:

- 1) *Population Census;*
- 2) *Intercensal Population Survey;*
- 3) *Compilation of Data Resulting from Population Registration;*
- 4) *Demographic Survey (fertility, mortality, migration);*
- 5) *National Labor Force Survey;*
- 6) *Statistical Survey of Labor Wages (SUB);*
- 7) *National Socio-Economic Survey, Core;*
- 8) *National Socio-Economic Survey, Demographic and Welfare Module*
- 9) *Statistical Survey of Housing And Settlement;*
- 10) *Survey of Village Potentiality;*
- 11) *Compilation of Environmental Statistics;*
- 12) *Compilation of Health Statistics;*
- 13) *Compilation of Educational Statistics; and*
- 14) *Compilation of Criminal Statistics.*



Gambar 5.3. Sensus Penduduk dilaksanakan untuk menghitung seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia, baik permanen maupun tidak. Sensus Penduduk dilakukan sepuluh tahun sekali, yaitu pada tahun dengan akhiran nol (0).

Figure 5.3. Population Census is administered to have the number of the entire population residing inside Indonesian territory, whether permanent or not. Its census regularly administered once in ten years in the null-ending year.

Statistik bidang lainnya akan ditetapkan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perikehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Statistik, dapat mengalami revisi seiring dengan perjalanan waktu.

Statistics for other fields are to be determined as required by life and development circumstances. So that, this BPS-Statistics Indonesia Chief Statistician Decree Number 6 Year 2001 on Basic Statistical Management can be revised in the future.

5.3. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung simpoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan *mainframe*. Sejak 1980-an, personal

5.3. Data Processing

The processing phase of data determines to a large extent on how accurate and how precise statistics are. In order to achieve high levels of accuracy and precision, BPS employs several supporting facilities such as scanners and computers. Many people from other government offices regard BPS pioneered the use of computers due to the fact that it started using the equipment relatively early, i.e., before 1960. Before using computers, BPS had been using mechanical calculators and abacuses.

The computer technology applied at BPS is always adjusted to the progress made in information technology and to the needs. Cheaper and more adequate and efficient personal computers have also been used to replace the mainframe computers. Personal computer technology has been utilized

komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.

Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin *scanner*, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai untuk menghasilkan data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, juga mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, *Input-Output (I-O) table*, *Social Accounting Matrix (SAM)*, dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

in all BPS provincial branch offices since 1980's, followed by all regency and municipal branch offices since 1992.

By using personal computers, BPS regional offices can immediately proceed to data processing following a certain data collection activity, particularly the feeding of raw data into computers, before the data are transmitted to the BPS headquarters for further processing to produce national data.

Data processing using personal computers has long been the processing mode adopted by subject matter directorates at BPS headquarters, when they try to summarize the results obtained from surveys conducted by the directorates involved.

In the 2000 Population Census scanners were used to speed up data processing activities. The use of computers by subject matters has very significant effects. Beside its speed, it also motivates the staff involved to take charge in the responsibility of producing a great deal of statistics and indicators more timely and accurately than before. Moreover, the use of computer has contributed much to make it possible for BPS to generate various complicated-to-process statistics and indicators such as poverty, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), and many other composite indexes, in relatively short time.

In 1993 BPS started to develop a statistical geographical information system especially for the processing of spatial data up to the smallest administrative units which had been done manually since 1970. This spatial data set especially those representing prominent regional characteristics are needed by planners for use in development planning.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk *data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis* dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

5.4. Analisis Data

Agar pengguna data dapat membaca dan menginterpretasikan data yang dipublikasikan dengan lebih mudah, BPS membuat analisis dan laporan statistik secara berkala. Hasil-hasil kegiatan statistik dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan/data rinci untuk tujuan akademis dan dalam bentuk ringkasan eksekutif untuk bahan pengambilan keputusan.

BPS juga membuat evaluasi kegiatan pembangunan dengan menyajikan indikator kinerja yang tipe serta kriterianya ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai proses. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari analisis data, BPS bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang terkait dan lembaga-lembaga internasional serta bekerjasama dengan para pakar dan perguruan tinggi. Hal ini dilaksanakan segera setelah data dipublikasikan.

Selain itu BPS juga mengembangkan analisis dengan metode-metode statistik antara lain analisis

In processing its data, BPS has developed application programs for data entry, editing, validation, tabulation and analysis by using different types of computer languages and packages. BPS headquarters is responsible for the development of computer softwares and for handing down the knowledge to regional office staff.

Information technology infrastructure development in BPS is based on the target set to be achieved, i.e., to keep abreast of the demand for them and requirement in statistical data processing; conducting renewal/innovation to achieve better and better work method and to provide facilities to make it easy for the public to obtain statistical information.

5.4. Data Analysis

In order to assist data users in reading and interpreting published data, BPS conducts periodic analysis and reporting. Results of statistical activities are analyzed and published in the form of detailed reports for academic purposes and in the form of executive summaries for use in decision makings.

BPS also conducts evaluation of development activities by producing performance indicators which types and depths are determined by national and local governments through a certain process. To obtain the optimal benefits from data analysis, BPS collaborates with several related government agencies and international institutions as well as with professionals from universities. This is especially done immediately after data reports have been released.

Moreover, BPS also develop analysis using statistical methods, for example analysis to determine

penentuan penduduk miskin, penggunaan teknik-teknik proyeksi dan ramalan, penghitungan neraca bahan makanan, dan standar konversi untuk berbagai jenis data. BPS juga menyelenggarakan berbagai seminar bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui hasil analisis BPS dan metode yang sedang berlaku dan yang akan datang.

Kualitas data merupakan salah satu yang perlu diprioritaskan dan dipertahankan. Data dengan kualitas yang tinggi hanya dapat dihasilkan oleh para staf yang telah mengikuti pelatihan dan supervisi secara efektif. Dengan menggunakan metode tertentu, kualitas data tertentu dapat dievaluasi, misalnya dengan pengujian standar error.

who among the residents are poor, utilizing techniques of projection and forecast, compiling food balance sheet, and calculating conversion standard of various data types. BPS also conducts various seminars for the society so that the society members are informed about the results of analyses made by BPS and the current method used as well as the future ones.

Data quality is one that should be prioritized and maintained. High quality data can only be produced by staff who have received training and effective supervisions. By utilizing certain methods the quality of certain data set can be assessed, for example by examining its standard error. It is important to note, however, that only selected variables are deemed worth publishing with their standard error.

<http://www.bps.go.id>

6

DISEMINASI DAN PELAYANAN
INFORMASI STATISTIK
*DISSEMINATION AND STATISTICAL
INFORMATION SERVICES*



Pelayanan publik menjadi indikator akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk itu, BPS sebagai salah satu pelayan publik informasi statistik melakukan penyebarluasan data/informasi statistik melalui berbagai cara sebagai berikut.

6.1. Rujukan Statistik

Terkait dengan rujukan statistik, BPS memiliki Sistem Informasi Rujukan Kegiatan Statistik (SiRusa) sebagai suatu situs web yang menyediakan informasi metadata kegiatan statistik yang ada di Indonesia, dalam rangka menunjang terbentuknya Sistem Statistik Nasional (SSN). SiRusa dapat diakses dengan mengetikkan alamat URL sirusa.bps.go.id. Dengan adanya SiRusa, diharapkan duplikasi kegiatan statistik dapat dihindari.

Informasi yang dapat diperoleh melalui SiRusa antara lain:

- 1) Siapa penyelenggara kegiatan
- 2) Tahun pelaksanaan kegiatan
- 3) Metodologi pengumpulan data dan estimasi
- 4) Hasil utama kegiatan
- 5) Diseminasi kegiatan
- 6) dan lain-lain

6.2. Publikasi Statistik

Informasi statistik dikemas baik dalam bentuk media cetak seperti buku maupun media elektronik seperti publikasi elektronik dan internet. Publikasi ini merupakan produk yang memaparkan hasil kegiatan BPS secara lengkap dan rutin.

a. Konferensi Pers

Konferensi pers diselenggarakan untuk menyampaikan data statistik secara resmi kepada para wartawan media cetak maupun elektronik.

Public service is now the accountability indicator of a government agency. On that account, BPS, as one of the public servants in statistical information, disseminates its data/statistical information by several means, among others, through the following procedures.

6.1. Statistical Referral

In connection with statistical referral, BPS has created and maintained an information system called Sistem Informasi Rujukan Kegiatan Statistik (SiRuSa) which is a website that provides metadata information of theoretically all statistical activities existing in Indonesia as a part of the framework created to support National Statistics System (NSS). SiRuSa can be accessed by typing its URL address: sirusa.bps.go.id. The existence of SiRuSa is expected to prevent duplication in statistical activities.

The types of information that can be obtained from SiRuSa are, among others, the following:

- 1) the name of the person/organisation in charge of the activity,
- 2) the year the activity took place,
- 3) data collectin and estimation methods,
- 4) the activity main product,
- 5) the activity dissemination,
- 6) and others as deemed appropriate.

6.2. Statistical Publication

Statistical information are packaged in the form of printed media such as book or electronic media such as electronic publication and internet. These publications comprise products that tell complete story about the results of BPS activities regularly.

a. Press Release

Press release event is administered to inform officially printed and electronic media journalists about statistical data available at BPS. One of the

Salah satu penyampaian berita yang rutin dan serentak dilakukan BPS Pusat maupun BPS Provinsi adalah Berita Resmi Statistik (BRS) dan pengumuman lainnya yang belum dimasukkan dalam kategori.

b. Publikasi Cetak

Publikasi dalam bentuk buku diterbitkan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan. Untuk lebih jelas, referensi pokok tentang informasi statistik yang dihimpun BPS, dan menyediakan informasi awal yang berkaitan dengan judul publikasi, tahun referensi, serta gambaran ringkas tentang isi setiap publikasi terdapat dalam Katalog Publikasi BPS.

news conveyance that is regularly and simultaneously conducted by BPS headquarters and BPS provincial branches is *Official Statistics News (Berita Resmi Statistik or BRS)* and other issues that have not been categorized.

b. Printed Publication

Printed publications in the form of books are issued monthly, quarterly, and yearly. In order that there is no ambiguities occur, BPS prepares a initial reference about all statistical information it has gathered, i.e., *BPS Publication Catalogue*, which contains preliminary information related to publication title, reference year, and short illustration of the content of every publication.



Gambar 6.1. Salah satu bentuk publikasi BPS adalah berupa buku publikasi yang diterbitkan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan.

Figure 6.1. Book is a form of BPS-Statistics Indonesia publications. BPS-Statistics Indonesia publication books are issued monthly, quarterly, or annually.

Publikasi BPS dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama subyek meliputi: Umum (multisubyek), Sensus Penduduk dan Perumahan, Demografi, Statistik Sosial, Pertanian, Industri, Pertambangan, Energi, dan

BPS publications are categorized into several subject groups, namely, *general (multisubject), population and housing census, demography, social, agriculture, manufacturing, mining, energy, construction, price and finance, trade,*

Konstruksi, Harga dan Keuangan, Perdagangan, Transportasi, Jasa dan Pariwisata, Neraca Nasional, Regional, dan Kegiatan Ekonomi lainnya. Beberapa contoh periode terbit dan judul publikasi:

- Khusus:** Sensus Penduduk Indonesia 2000; Proyeksi Penduduk Provinsi Menurut Umur dan Jenis Kelamin 2005-2015; Profil Statistik Wanita, Ibu dan Anak di Indonesia;
- Bulanan:** Buletin Impor 2008; Buletin Ekspor 2008; Indikator Ekonomi;
- Triwulanan:** Statistik Struktur Upah; Indikator Konstruksi 2007 Triwulan 2; Statistik Tanaman Biofarmaka dan Hias 2006;
- Semesteran:** Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Februari 2008; Daftar Satuan Harga Barang dan Jasa di DKI Jakarta dan Analisisnya;
- Tahunan:** Laporan Perekonomian Indonesia; Indeks Pembangunan Manusia; Statistik Konstruksi 2006; Sistem Pemantauan Beberapa Indikator Dini (Ringkasan Metodologi);
- Lainnya:** Proyeksi Angkatan Kerja Indonesia 2003-2010 (periode sepuluh tahunan); Profil Kependudukan Indonesia (periode lima tahunan); Tren Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi (periode sepuluh tahunan).

c. Publikasi Elektronik

Publikasi BPS disediakan juga dalam bentuk *Compact Disk* atau media elektronik lainnya.

transportation, service and tourism, national account, regional account, and other economic activities. Below are several examples of publication titles and their respective issue period:

- Special:** *the 2000 Population Census of Indonesia, the 2005-2015 Provincial Population Projection by Age and Sex, Profile of Women, Mothers, and Children in Indonesia;*
- Monthly:** *the 2008 Import Bulletin, the 2008 Export Bulletin, Economic Indicators;*
- Quarterly:** *Wage Structure Statistics, Quarter II 2008 Construction Indicators, Medicinal Herb and Ornamental Crops Statistics;*
- Six-monthly:** *The February 2008 Employment Situation in Indonesia, List and the Analysis of Unit Price of Goods and Services in Jakarta;*
- Yearly:** *Indonesian Economic Report, Human Development Index, The 2006 Construction Statistics, Several Early Indicators Monitoring System (Methodology Summary);*
- Others:** *The 2003—2010 Indonesian Labor Force Projection (ten-yearly period), Indonesian Population Profile (five-yearly period), Fertility, Mortality, and Migration Profile (ten-yearly period).*

c. Electronic Publication

Besides printed form, publication are also made available in the form of CD (compact disk) or other electronic media.

d. Situs Web

- Situs BPS Pusat yang dapat diakses dengan mengetikkan URL www.bps.go.id
- Situs BPS Provinsi, misalnya: kepri.bps.go.id, yogyakarta.bps.go.id, bali.bps.go.id, sultra.bps.go.id, irjabar.bps.go.id.

e. Media lainnya

Seminar, leaflet (selebaran), buklet, dsb.

d. Web Site

- BPS Headquarters website which can be accessed by typing its URL www.bps.go.id
- BPS Provincial website, for example kepri.bps.go.id, yogyakarta.bps.go.id, bali.bps.go.id, sultra.bps.go.id, irjabar.bps.go.id.

e. Others

Seminar, leaflets, booklets, and so on.

6.3. Layanan dan Promosi Statistik

Bentuk pelayanan utama BPS sebagai sentral data adalah melayani permintaan data dari pengguna data baik dari kalangan peneliti, mahasiswa, maupun kalangan umum. Bentuk layanan tersebut dapat diakses secara langsung dengan datang ke kantor BPS, melalui telepon, surat elektronik maupun situs web. Selain itu, BPS juga menyediakan layanan konsultasi statistik.

Untuk lebih memasyarakatkan statistik maka perlu dilakukan promosi baik melalui situs web maupun seminar-seminar yang berkaitan dengan promosi statistik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat menjadi lebih peka terhadap kegunaan statistik dan diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas data statistik.

a. Perpustakaan dan Diseminasi Statistik

Perpustakaan melayani konsumen untuk data/informasi yang tersedia di buku-buku publikasi BPS.

b. Toko Buku Koperasi BPS

Toko buku koperasi BPS melayani penjualan buku-buku publikasi BPS.

c. Humas

Masyarakat atau pengguna data yang ingin mendapatkan informasi mengenai data atau

6.3. Statistical Promotion and Services

As a data center, the primary form of BPS service is the fulfilment of data request that come from data users such as researchers, university students, and the public. Data users are served by various ways: personally on the spot (those who come to BPS), via telephone, e-mail, or website. BPS also provides statistical consultation service.

In order to socialize statistics more intensively it deems necessary to promote statistics either through website or seminars related to statistical promotion. These activities are expected to sensitize the community toward understanding the advantages of having statistics so that they voluntarily participate in preserving the quality of statistics.

a. Library and Statistics Dissemination

The library serves data consumers who want to obtain data/information available in BPS publication books.

b. Cooperation Bookshop

BPS cooperative bookshop sells BPS publication books.

c. Public Relations

The community members or data users wishing to obtain information on BPS statistical activities

tentang kegiatan BPS secara umum dapat menghubungi bagian ini.

d. Berita Resmi Statistik

BPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, dan makro. Hasil statistik dasar diumumkan dalam berita resmi statistik (BRS). Subyek data statistik yang diumumkan antara lain:

Bulanan: Angka inflasi, ekspor/impor, nilai tukar petani (NTP), harga produsen gabah, upah buruh, pariwisata dan transportasi nasional.

Triwulanan: Angka PDB, indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen, angka produksi padi, jagung dan kedelai, produksi industri pengolahan besar dan sedang.

Lainnya: Profil kemiskinan (dirilis setahun sekali), keadaan ketenagakerjaan Indonesia (dirilis setahun dua kali)

e. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif merupakan ringkasan dari hasil kegiatan BPS atau dari publikasi tertentu yang diperuntukkan bagi para eksekutif/pejabat.

f. Buklet/Leaflet (Selebaran)

Leaflet (selebaran) merupakan produk yang dikeluarkan ketika ada acara-acara tertentu misalnya sosialisasi hasil kegiatan BPS. Contoh *leaflet* (selebaran) yang diterbitkan adalah Informasi Umum dan Indikator Penting

may in general contact BPS Public Relation Division.

d. Statistics Official News

BPS is tasked to produce basic statistics that are intended for wide range of uses, both within the government or the community, having the characteristics of inter-sectoral, national or regional coverage, and aggregated at national or regional level. The results of basic statistics are released in statistics official news. Among the topics issued are, among others, the following:

Monthly: Inflation rate, export/import, farmers' terms of trade, unhusked rice producers price, wages, national tourism, and transportation.

Quarterly: GDP figures, business and consumer tendency indexes, rice, corn, soyabean production figures, medium and large manufacturing production,

Others: poverty profile (released yearly), Indonesia's employment situation (released twice a year)

e. Executive Summary

Executive summary is the summary of the results of BPS activities or a particular publication intended for executives or high-ranking officials use.

f. Booklet/Leaflet

Booklet/leaflet is a product issued when a certain programs occur, e.g., socialization of the results of BPS activities. The example of leaflet issued is General and Important Indicators of Indonesia, while the examples of booklets are Key Indicators

Indonesia, sedangkan contoh buklet: Indikator Kunci Indonesia, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia.

of Indonesia, and Several Principal Socio-economic Indicators of Indonesia.



Gambar 6.2. Contoh publikasi BPS berbentuk leaflet (selebaran).
 Figure 6.2. Sample of BPS's leaflet publication.

7

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

<http://www.pps10.id>



7.1. Komposisi Pegawai BPS

Untuk dapat mencapai berbagai hasil yang diharapkan, BPS sangat mengandalkan pada kemampuan sumber daya manusianya. Sampai dengan bulan Juli 2008, jumlah pegawai BPS seluruh Indonesia (Pusat dan Daerah) yaitu 13.465 orang, sekitar 10,89 persen atau 1.466 orang bekerja di BPS Pusat dan 89,11 persen atau 11.999 orang bekerja di BPS Propinsi/Kabupaten/Kota (Tabel 7.1.).

Tabel 7.1. Pegawai BPS Menurut Kelompok Umur, Juli 2008

Table 7.1. BPS Personnel by Age Group, July 2008

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Unit Organisasi <i>Organization Unit</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Pusat <i>Headquarters</i>	Daerah <i>Regional Office</i>	
<20	2	220	222
21-24	49	1.164	1.213
25-29	72	1.753	1.825
30-34	178	1.669	1.847
35-39	279	1.673	1.925
40-44	244	1.772	2.016
45-49	297	2.076	2.373
50-55	326	1.664	1.990
>56	19	8	27
Jumlah/Total	1.466	11.999	13.465

Sementara itu, sebanyak 9.510 orang pegawai atau 70,63 persen dari total pegawai di seluruh BPS (Pusat dan Daerah) adalah laki-laki, sedangkan sebanyak 3.955 orang atau 29,37 persen adalah pegawai perempuan (Tabel 7.2.).

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, sebagian besar pegawai mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) kebawah (7.776 orang), S0 (522 orang), S1 (4.643 orang), S2 (498 orang) dan

7.1. BPS-Statistics Indonesia Personnel Composition

To accomplish the various outcome it expected to achieve, BPS relies heavily on its human resources. In July 2008, the number of BPS personnel was 13,465 persons, around 10.89 percent of the total personnel or 1,466 persons work in BPS Headquarters, while 89.11 percent or 11,999 persons in BPS regional offices (Table 7.1.).

Meanwhile, around 9,510 persons or 70.63 percent of the total personnel are male, and 3,955 persons or 29.37 percent are female (Table 7.2.).

Based on their educational background, the largest number (7,776 persons) of BPS personnel have completed senior high school (SMA) or lower levels of education (Table 7.3.), followed by those who have had some college level of education (4,643 persons), those who have completed college (522 persons), those who have had masters degree (498

yang berlatar belakang pendidikan S3 sebanyak 26 orang (Tabel 7.3.).

persons), and those who have had doctor degree (26 persons).

Tabel 7.2. Pegawai BPS menurut Jenis Kelamin, Juli 2008

Table 7.2. BPS Personnel by Sex, July 2008

Unit Organisasi <i>Organization Unit</i>	Pria <i>Male</i>	Wanita <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
Pusat/ <i>Headquarters</i>	852	614	1.466
Daerah/ <i>Regional Office</i>	8.658	3.341	11.999
Jumlah/Total	9.510	3.955	13.465

Tabel 7.3. Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan, Juli 2008

Table 7.3. BPS Personnel by Educational Level, July 2008

Satuan Organisasi <i>Unit Organization</i>	Tingkat Pendidikan <i>Education Level</i>						
	SD <i>Elementary</i>	SMP <i>Junior High School</i>	SMA <i>Senior High School</i>	S0 <i>S0</i>	S1 <i>S1</i>	S2 <i>S2</i>	S3 <i>S3</i>
Pusat/ <i>Headquarters</i>	31	25	619	76	497	193	25
Daerah/ <i>Regional Office</i>	125	163	6.813	446	4.146	305	1
Jumlah/Total	156	188	7.432	522	4.643	498	26

Menurut tingkatan eselon, yang terbanyak adalah eselon IV terdiri dari 2788 orang, yaitu 219 orang di BPS Pusat, 2.569 orang di BPS Daerah, disusul eselon III yaitu 711 orang (Pusat dan Daerah), 57 pegawai eselon II (Pusat dan Daerah) dan 8 pegawai eselon I di BPS Pusat (Tabel 7.4.).

Disaggregated by echelon, Table 7.4. shows that the largest number of BPS personnel are on echelon IV, i.e., around 219 persons in BPS Headquarters and 2,569 person in BPS regional offices, followed by those occupying echelon III level in the headquarters and regional offices (711 persons), then by those in echelon II in the headquarters and regional offices (57 persons), and lastly by those in echelon I who are entirely in the headquarters (8 persons).

Pada tabel 7.5. terlihat bahwa dari total pegawai BPS Pusat dan Daerah, yang terbanyak adalah golongan III (8.365 orang), disusul golongan II (4.242 orang), golongan IV (739 orang) dan golongan I sebanyak 119 orang.

In addition, Table 7.5. shows that most of BPS personnel are in rank III (8,365 persons). The second largest number is in rank II (4,242 persons), the third in rank IV (739 persons), and the smallest number in rank I (119 persons).

Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia, BPS membuka banyak

In relation with human resource development, BPS opens many opportunities for all personnel

kesempatan bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti berbagai macam program pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri.

to improve their skill by participating in various types of education and training programs, inside or outside the country.

Tabel 7.4. Pegawai BPS Menurut Tingkatan Eselon, Juli 2008

Table 7.4. BPS Personnel by Echelon Level, July 2008

Eselon Echelon	Pusat Headquarters	Daerah Regional Office
I	8	-
II	24	33
III	80	631
IV	219	2.569
Jumlah / Total	331	3.233

BPS juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan statistik secara mandiri yang berjangka panjang (3-4 tahun) yaitu sekolah statistik dan pelatihan singkat secara teratur melalui pusat pendidikan pelatihan statistik. BPS juga menyelenggarakan program pelatihan khusus yang ditawarkan pada para pemakai data.

BPS also runs its own statistical training, a long term (3-4 years) one in its statistical school called STIS and a regular short training through its Education and Training Centre called Pusdiklat BPS. In addition a special training program is also offered to data consumers.

Tabel 7.5. Pegawai BPS Menurut Golongan, Juli 2008

Table 7.5. BPS Personnel by Rank, July 2008

Unit Organisasi Organization Unit	IV	III	II	I
Pusat / Headquarters	153	1.044	262	7
Daerah / Regional Office	586	7.321	3.980	112
Jumlah / Total	739	8.365	4.242	119

7.2. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan program DIV, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1958. STIS mengemban visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berfungsi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu

7.2. Institute of Statistics

Institute of Statistics is a diploma 4 (DIV) college-level school run under BPS management since 1958. STIS has a vision of becoming a higher education government-run institute that functions to develop and spread science, especially in statistics and statistical

pengetahuan, khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik, dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik untuk menjadi statistisi profesional. Dengan demikian lulusan STIS merupakan tenaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian, melakukan analisis di bidang sosial-ekonomi serta merencanakan dan mengembangkan sistem informasi.

computation, by educating cadres who possess academic capabilities to become professional statisticians. As such, STIS graduates are ones capable of planning and implementing research, analyse social-economic data, and develop information systems.



Gambar 7.1. Pada tanggal 11 Agustus 1958, pendidikan tinggi pertama dalam bidang statistika, yaitu Akademi Ilmu Statistik (AIS) dibentuk. Kemudian pada September 1998, AIS dijadikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dengan jenjang pendidikan Diploma IV. Dalam gambar merupakan Gedung 1 STIS yang berfungsi sebagai Gedung Rektorat (keadaan pada 2008).

Figure 7.1. On August 11th, 1958, the first higher education in the field of statistics named Academy of Statistics (AIS) was established. Later, in September 2008, AIS was integrated into the Institute of Statistics with Diploma IV level. The picture shows 1st building of STIS (in 2008) that has function as rectorate building.

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang dikenal saat ini mempunyai riwayat yang panjang, mulai dari dibentuknya Akademi Ilmu Statistik (AIS) sampai statusnya diubah menjadi seperti sekarang. Pada tanggal 11 Agustus 1958, Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, Ir. H. Djuanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 377/PM/1958 tentang berdirinya Akademi Ilmu Statistik. Lulusannya merupakan Sarjana Muda dengan gelar *Bachelor of Statistics* (B.St.). Tujuan utama pendidikan AIS

STIS as it is now known has a long history, starting from the establishment of Academy of Statistics (Akademi Ilmu Statistik/AIS) to the moment it was changed into the current status. On August 11, 1958, Mr. H. Juanda, the Prime Minister of the Republic of Indonesia at that time, issued decree Number 337/PM/1958 concerning the establishment of Academy of Statistics (AIS) and thus AIS was established. Every AIS graduates was given a bachelor degree in statistical science (a known as Bachelor of Statistics or B.St.). The main purpose of AIS

adalah mendidik tenaga pelaksana kegiatan statistik pada tingkat semi ahli yang saat itu rasanya mampu mengembangkan perstatistikan nasional.

Pada tahun akademik 1997/1998, AIS diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program diploma 4 tahun (DIV) melalui keputusan Menteri Pendidikan Nomor 295/D/T/97, tanggal 24 Februari 1997. Kurang dari dua tahun setelah itu, dibentuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) melalui Keputusan Presiden nomor 163 tanggal 11 September 1998. AIS dilebur ke dalam STIS yang dibentuk dengan dua jurusan: Jurusan Statistika (Ekonomi dan Sosial-Kependudukan) dan Jurusan Komputasi Statistik. Jurusan Statistika dirancang untuk berkonsentrasi pada statistika terapan di bidang ekonomi serta sosial-kependudukan, sedangkan Jurusan Komputasi pada komputasi statistik terapan dan sistem informasi.

Dosen pengajar berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan jenjang S2 dan S3, merupakan kombinasi antara praktisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun dengan lulusan baru yang membawa ide-ide baru dan perkembangan terbaru di bidang ilmunya masing-masing. Pengelola STIS meyakini bahwa mutu lulusan sangat ditentukan oleh mutu dosen sehingga pemilihan dosen dilakukan dengan penuh pertimbangan.

Pada Tabel 7.6. dicantumkan data pegawai struktural dan fungsional dosen yang merupakan penyelenggara STIS sehari-hari. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 72 orang, 47 di antaranya bergelar sarjana sedangkan sisanya sekolah menengah atas ke bawah, mengurus pekerjaan administrasi dan teknis sehari-hari agar STIS berjalan lancar. Tampak di sana bahwa jenjang pendidikan para fungsional dosen bervariasi namun yang terbanyak adalah S2. Ada 24 orang bergelar master dan 7 orang bergelar doktor. Namun

was to educate people to become medium level statisticians that was thought to be capable of developing national statistics.

In the 1997/1998 academic year, AIS was given the opportunity to run a four-year diploma education (D-IV program) based on the Ministry of Education Decree Number 295/D/T/97, dated February 24, 1997. Less than two years after that, Institute of Statistics (STIS) was established based on Presidential Decree Number 163, dated September 11th, 1998. AIS was then integrated into STIS instituted with 2 (two) majors: Statistics (with two minors, namely, Economic Statistics and Social-Demographic Statistics) and Statistical Computation. Statistics major is designed to concentrate on applied statistics in the field of economics and social-demographics statistics, while Statistical Computation major on applied statistical computation and information system.

STIS lecturers are graduates of domestic and foreign universities with masters (S2) and doctoral (S3) degrees a combination of experienced practitioners and new recruits with novel ideas and up-to-date knowledge. STIS caretakers are convinced that the quality of the graduates are highly dependent upon the the quality of the teaching staff so that lecturers are chosen with the utmost deliberation.

Table 7.6. contains the number of STIS caretakers composing of those occupying structural positions, disaggregated by echelon, and functional lecturers. The table shows that 72 people, 47 people with college degrees and the rest with high school or lower educational achievement, are involved in the day to day work to do administrative as well as technical affairs for the benefit of STIS. It can also be seen there that educational backgrounds of the lecturers vary, however, most has achieved S2 degrees. There were 24 functional structural lecturers with masters degrees and seven with

ini baru sebagian dari tenaga pengajar. Mereka masih didukung oleh tenaga pengajar lain yang merupakan praktisi di bidangnya masing-masing, umumnya berpendidikan S2 atau S3, bekerja baik di BPS maupun di instansi lain.

PhD degrees. But these are only a part of the teaching staff; they are supplemented by another group who are practitioners in various fields generally having achieved S2, but a few with S3 degrees, working in BPS or other agencies.

Tabel 7.6. Pegawai STIS-BPS Menurut Pendidikan & Jabatan Tahun Akademik 2008/2009

Table 7.6. STIS-BPS Personnel by Education & Function Year Academic 2008/2009

Pendidikan <i>Education</i>	Struktural <i>Structural</i>				Staf <i>Staff</i>	Dosen <i>Lecturer</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Eselon II <i>Echelon II</i>	Eselon III <i>Echelon III</i>	Eselon IV <i>Echelon IV</i>	Fungsional <i>Functional</i>		Non Fungsional <i>Non Functional</i>		
S3	1	1	-	-	3	2	7	
S2	-	1	1	-	13	9	24	
S1	-	-	3	1	3	7	14	
D3	-	-	-	2	-	-	2	
SLTA/ <i>Senior High School</i>	-	-	1	21	-	-	22	
SLTP/ <i>Junior High School</i>	-	-	-	2	-	-	2	
SD/ <i>Elementary School</i>	-	-	-	1	-	-	1	
Jumlah/ <i>Total</i>	1	2	5	27	19	18	72	

Sampai saat ini, dalam usianya yang sudah melebihi setengah abad AIS/STIS telah mencetak ribuan ahli statistik yang hampir semuanya bekerja di BPS. Tentu mudah dibayangkan bahwa sumber segala kesuksesan yang dicapai BPS adalah AIS/STIS serta ketekunan lulusan-lulusannya untuk mereguk ilmu sambil bekerja. Banyak yang bersedia bersekolah kembali, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menambah ilmu yang telah dimiliki. Melihat fakta ini, maka salah satu upaya yang logis untuk meningkatkan mutu BPS adalah meningkatkan mutu lulusan STIS, dan karena itu mutu STIS sendiri serta pengelolanya, karena lulusannya, cepat atau lambat, akan memegang kendali di BPS. Para pengelola STIS hendaknya merupakan individu-individu yang mapan, baik dari sisi ilmu maupun integritasnya, sebab kalau tidak mutu lulusan tidak akan seperti yang diharapkan.

Up to the moment, its age now more than half a decade, AIS/STIS has produced thousands of statisticians most of whom work for BPS. It is not difficult to imagine that the origin of the successes BPS has achieved come from AIS/STIS coupled with the dedication given by its graduates who never stop seeking for new knowledge while work is in progress. Many persevere to continue their education, in the country or outside, to improve their knowledge by adding new ones. This fact tells us that one logical way to improve the quality of BPS is to improve the quality of STIS graduates, and therefore the quality of the school itself and that of its caretakers, because the graduates, sooner or later, are the ones who will be making important decisions for BPS. The STIS caretakers should consists of individuals who are not only secure in terms of their knowledge but also firm in terms of their integrity because if that is not so then the quality of the graduates will deviate from what is expected.

Berbicara mengenai jumlah lulusan STIS terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 50 orang di tahun 50-an dan 60-an sampai lebih dari 200 orang pada akhir-akhir ini. Sebagai gambaran ringkas disertakan jumlah lulusan tahun akademik 2007/2008 pada Tabel 7.7. Dapat dilihat di sana bahwa jumlah lulusan adalah 284 orang terdiri dari 111 laki-laki dan 173 perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa di bidang ilmu yang sering dianggap sulit ini perempuan telah mengungguli laki-laki. Jika selama bertahun-tahun jumlah lulusan perempuan amat didominasi jumlah lulusan laki-laki, kini sebaliknya yang terjadi. Tabel 7.7. juga menunjukkan bahwa di jurusan komputasi laki-laki masih unggul meski cuma sedikit. Jika nanti terbukti bahwa wanita memang merupakan statistisi yang baik maka perkembangan ini akan menjadi faktor pendukung yang positif bagi perkembangan BPS.

Speaking about the number of students graduating it increases with the years, starting from around 50 during the fifties and probably sixties but in recent years it has increased to more than 200. The number of students graduated in 2007/2008 academic year can be found on Table 7.7., which shows that the total number graduating was 284 students consisting of 111 male students and 173 female students. If for a long time the number of female students was heavily dominated by that of male, the new development is the other way around. That means that in this particular branch of the science normally regarded as difficult, female students are already winning the race between the sexes. Table 7.7. shows that the number of female dominate that of male in the statistics major while male only slightly ahead in the computation major. If later women proved to be better statistician than men than the new phenomenon will become a favorable factor for BPS advancement.

Tabel 7.7. Lulusan STIS-BPS Tahun Akademik 2008/2009

Table 7.7. Graduated of STIS-BPS Year Academic 2008/2009

Jenis Lulusan <i>Type of Graduates</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
	D IV Statistika Ekonomi	39	
D IV Statistika Kependudukan	33	67	100
D IV Komputasi Statistik	39	36	75
Jumlah/ <i>Total</i>	111	173	284

Dapat ditambahkan bahwa jumlah 284 ini telah meningkat cukup besar dibandingkan dengan jumlah lulusan beberapa tahun ke belakang. Ketika tiga tahun lalu jumlah lulusan baru mencapai sekitar 200 sudah dihitung bahwa STIS tidak akan pernah dapat memenuhi jumlah yang diperlukan untuk mengisi kekurangan pegawai di BPS pusat dan daerah. Untuk itu jumlah lulusan yang pensiun per tahun harus melebihi yang lulus tahun yang

It may be noted that compared to just a few years back, the 284 figure is already a significant increase. When the number of graduates was about 200 three years ago it was calculated that STIS would never be able to produce enough people to fulfil the number required to man BPS headquarters and regional offices if the number stays the same. The number added must surpass the number retired if the lag is to be filled and eventually erased. It must be

bersangkutan. Apakah jumlah yang sekarang sudah memadai masih harus dihitung kembali.

Lulusan STIS mendapat gelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.). Begitu lulus mereka langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) golongan IIIa pada Badan Pusat Statistik dan ditempatkan di kantor-kantor BPS di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota sesuai aturan yang berlaku. Sebagai sarjana mereka diharapkan untuk dapat mengoptimalkan potensinya melakukan pengumpulan fakta lapangan dan penelitian sesuai dengan ilmu yang dimiliki sehingga suatu ketika menjadi motor perkembangan BPS dan statistik.

recalculated whether the present number is already satisfactory.

STIS graduates are each awarded an applied science degree (Sarjana Sains Terapan/S.S.T). They are directly recruited to become government employee candidate (CPNS) having the rank of IIIa and are each appointed to work in one of BPS provincial or regency branch office in accord with what the regulation says. As a degree holder they are expected to be able to optimize their potentials to collect data and do research which are what they have learned to do, until they develop to become the engine of BPS and statistics developments.



Gambar 7.2. Pada 29 Oktober 2008, bertempat di Gedung Dhanapala-Kompleks Departemen Keuangan, STIS mewisuda mahasiswa angkatan ke-46 sebanyak 284 orang. Lulusan ini akan menjalankan tugas ikatan dinas di seluruh wilayah di Indonesia.

Figure 7.2. On October 29th, 2008, STIS inaugurated the 46th class of 284 students, at Dhanapala Building-Ministry of Finance Complex. All the graduates will go through their scholarship contract to work for one of BPS branch offices existing throughout the country

Di tempat mereka bertugas sambil mencoba menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh di bangku sekolah, mereka juga berusaha menyerap pengalaman lapangan dari teman-teman sejawat yang sudah terlebih dahulu bekerja,

In the workplace, while they try to apply what they have learned at school, they also learned from the experience of their colleagues, most probably also STIS graduates who have worked longer, primarily about how to organize

yang kemungkinan besar juga lulusan STIS, utamanya mengenai bagaimana mengorganisasikan pelaksanaan program-program BPS di tingkat lapangan serta bagaimana menjalin kerja sama dengan orang-orang instansi lain yang ditunjuk dan dengan anggota-anggota masyarakat. Setelah mereka dirasa cukup lama berada di suatu tempat, mereka akan dimutasikan ke tempat lain untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman lain.

Akan tiba saatnya ketika mereka diberi kesempatan mengikuti berbagai macam pelatihan dan pendidikan, ada kalanya di luar negeri, lalu dipromosikan ke tugas yang lebih tinggi tingkatannya dan seterusnya hingga mereka menjadi sumber daya yang matang, ikut membentuk korps statistikawan yang dari waktu ke waktu telah memberi kontribusi yang besar bagi perkembangan BPS dan statistik di Indonesia.

7.3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat BPS)

a. Sejarah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (BPS) didirikan pada tahun 1993 dengan nama Unit Pelaksana Teknis Statistik dan Komputer (UPT Statistik dan Komputer) dipimpin oleh pejabat Eselon III dan merupakan bagian dari Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik (PPLS), dipimpin pejabat Eselon II yang beralamat di Jl Otista Raya No. 64 C Jakarta Timur. Pada tahun 1997, sesuai dengan perkembangan tugas pokok dan fungsinya maka UPT Statistik dan Komputer berubah menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik dan Komputer (Pusdiklatikom) dipimpin oleh pejabat Eselon II dan menempati gedung baru yang merupakan bantuan pemerintah

the implementatin of BPS programs at field level, and how to cooperate with contacts from other agencies and with members of the community, all for the success of the programs. After they spend considerably enough time in one place usually they will be transferred to some other place intended for them to gain more knowledge and experience.

Occasions will come when they are required to attend various kinds of trainings and more education, sometimes abroad, promoted to higher ranks, and so on, until they become mature human resources qualified enough to join the corps of statisticians who have time and again make great contribution to the developments of BPS and statistics in Indonesia.

7.3. Statistical Education and Training Center of BPS-Statistics Indonesia

a. History

The Statistical Education and Training Center of BPS-Statistics Indonesia (locally called Pusdiklat BPS) was established in 1993, and its original name was Statistics and Computer Technical Executor Unit (Unit Pelaksana Teknis / UPT). This unit was lead by an echelon III officer, and was placed under the management of Education and Training Center of Statistics (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik / PPLS), a higher organisation lead by an echelon II officer. This unit situated at Jl. Otista Raya No. 64 C Jakarta Timur. Later on, along with the expansion of its main duty and function, the Statistics and Computer UPT was changed into Statistics and Computer Education and Training Center (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik dan Komputer / Pusdiklatikom), led by an echelon II officer, and situated in a new building,

Jepang di Jl Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2001 Pusdiklatikom berubah nama menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS, sehingga tugas pokok dan fungsinya berubah tidak hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bidang statistik dan komputer saja tetapi seluruh jenis pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan BPS.

b. Visi dan Misi

Visi:

Pusdiklat BPS “Prima dalam penyelenggaraan diklat statistik dan komputasi, kepemimpinan, serta diklat manajemen dan teknis lainnya”

Misi:

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pusdiklat BPS yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabus dan modul pembelajaran yang berorientasi upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar internasional;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik, komputasi, kepemimpinan, manajemen, dan teknis lain, yang memiliki kualitas akademik secara profesional dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks;
- 3) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik;

built by grant from the Japanese government, at Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

In 2001, Pusdiklatikom was transformed into Education and Training Center (Pusdiklat) of BPS. Thus, its main duty and function is also expanded to cover all types of education and training in BPS, not only in statistical and computer areas as it used to be but also other types of education and training as fitting BPS needs and activities.

b. Vision and Mission

Vision:

Pusdiklat BPS is “prime in running education and training in statistics and computer, leadership, and other management and technical knowledge”.

Mission:

In order to achieve the vision of Pusdiklat BPS, its missions, portraying what it needs to do, are stipulated as follows:

- 1) *Developing and improving the system, curriculum, syllabus, and study module so that they are orientated towards the efforts to enhance statistics and computer technology mastery on the basis of competency and in accordance with international standard;*
- 2) *Improving the quality of human resources by running and ever improving statistics, computation, leadership, management and other technical knowledge education and training programs that possess professional academic quality and able to meet the needs of the more and more complex development effort;*
- 3) *Improving the quality of the teaching staff, Pusdiklat organizer, and other Pusdiklat staff, in order to increase their statistical performance;*



Gambar 7.3. Gedung Pusdiklat BPS, Jl. Raya Jagakarsa no. 70, Lenteng Agung

Figure 7.3. Pusdiklat BPS's building, Jl. Raya Jagakarsa no.70, Lenteng Agung



Gambar 7.4. Halaman depan Gedung Pusdiklat BPS Lenteng Agung

Figure 7.4. Front yard of Pusdiklat BPS' building, Lenteng Agung.

- | | |
|--|---|
| <p>4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan insitusi statistik negara maju dan Pusdiklat instansi pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan;</p> <p>5) Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta sistem komputasi yang memadai;</p> <p>6) Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelola diklat serta pemberdayaan dan pendayagunaan alumni dan mengantisipasi dampak pendidikan dan pelatihan;</p> <p>7) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan menjaga stabilitas serta disiplin pegawai.</p> | <p>4) <i>Improving cooperation and coordination with other statistical agencies in developed countries and Pusdiklat of other government agencies in order to increase the quality of professional human resources through education and training;</i></p> <p>5) <i>Enhancing and improving education and training facilities and infrastructure, and an adequate computer system;</i></p> <p>6) <i>Developing monitoring and evaluation systems to improve the quality of officials in Pusdiklat, empowering and utilizing the alumni, and anticipating the impact of education and training;</i></p> <p>7) <i>Improving employees welfare and keep watching employees stability and discipline.</i></p> |
|--|---|

c. Gedung dan Lahan

Pusdiklat BPS didirikan di atas lahan dengan luas 7.039 m² dengan luas bangunan 4.354 m² dan memiliki area parkir seluas 1.500 m². Gedung Pusdiklat BPS terdiri dari 4 lantai, digunakan untuk kantor/ruang kerja pengelola pusdiklat, *cafeteria*/ruang makan, ruang konferensi, dan internet/intranet (lantai 1), ruang kelas, pengajar, dan perpustakaan (lantai 2), ruang pengajar dan penginapan peserta (lantai 3), dan penginapan peserta (lantai 4).

c. Building and Area

Pusdiklat BPS building was constructed on a 7039 square meter piece of land: 4354 square meter for the building itself, and 1500 square meter for parking area. The building is a four-storey one, allotted for office spaces of the Pusdiklat caretakers, *cafeteria*/dining room, conference rooms, and internet/intranet room (first floor); classrooms, lecturers' rooms and library (second floor); additional lecturers' rooms and dormitories (third floor); and additional dormitories (fourth floor).

d. Fasilitas

Pusdiklat BPS dilengkapi fasilitas-fasilitas yang dijabarkan pada Tabel 7.8.

d. Facilities

Statistical Training Center BPS is equipped with the following facilities shows on Table 7.8.

Tabel 7.8. Fasilitas yang dimiliki Pusdiklat BPS**Table 7.8. Pusdiklat BPS' facilities**

Fasilitas/ Facilities	Keterangan/ Notes
Penginapan <i>Overnight-Stay Rooms</i>	40 kamar <i>40 bedrooms</i>
Ruang kelas <i>Class room</i>	4 kelas konvensional <i>4 conventional class</i>
Laboratorium komputer <i>Computer lab</i>	2 kelas <i>2 class</i>
Area Jaringan Lokal <i>Local Area Network</i>	Seluruh ruang kerja dan laboratorium komputer <i>All working area and computer lab are covered</i>
Ruang internet <i>Internet room</i>	10 PC terhubung dengan internet dan intranet BPS <i>10 PC's are connected with internet and intranet of BPS</i>
Fasilitas belajar mengajar <i>Learning facilities</i>	PC, laptop, LCD, viewer, printer laser <i>PC, laptop, LCD, Viewer, Laser printer</i>
Ruang konferensi <i>Conference Room</i>	Berkapasitas 150 orang <i>Capacity of 150 persons</i>
Ruang Makan <i>Dining Room</i>	Berkapasitas 100 orang dilengkapi dengan karaoke <i>Capacity of 100 persons and equipped with karaoke system</i>
Perpustakaan <i>Library</i>	Sekitar 11.260 buku teks dalam dan luar negeri, publikasi BPS, kertas kerja peserta diklat <i>Holding around 11.260 books: local and internasional textbook, BPS Publication, working sheets of training participants.</i>
Fasilitas olah raga <i>Sport facilities</i>	Futsal, badminton, voli, biliard dan tenis meja <i>Futsal, badminton, volleyball, billiard, and table tennis</i>
Fasilitas hiburan <i>Entertainment facilities</i>	Karaoke, gitar, keyboard, electone <i>Karaoke, guitar, keyboard/ electone</i>
Ruang pengajar (Widyaiswara) <i>Instructor Room</i>	3 ruang dengan fasilitas komputer dan printer <i>3 rooms with computer and printer</i>
Kendaraan operasional <i>Operational vehicle</i>	1 bis kapasitas 30 orang, 5 mobil tipe MPV <i>1 bus capacities for 30 persons, 5 cars type MPV</i>

e. Pendidikan dan dan Pelatihan

Berdasarkan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil maka BPS ditunjuk sebagai Instansi Pembina untuk Jabatan

e. Education and Training

Based on the Presidential Decree No. 87 Year 1999 on Civil Servant Functional Cluster of Officers, BPS is appointed as a cultivating agency (Instansi Pembina) for statistics functional officer and

Fungsional Statistik dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, yang tertulis dalam SK Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003.

computer software functional officer (Jabatan Fungsional Statistik dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer), as is also written in the Ministerial Decree of State Minister for Government Apparatus Control No. 66/KEP/M.PAN/7/2003.

Tabel 7.9. Jenis Diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS

Table 7.9. Various types of education and training organized by Pusdiklat BPS

Diklat dalam Jabatan <i>Education & Training</i>	Penjelasan <i>Notes</i>
Diklat Kepemimpinan/Manajemen <i>Education and Training of Leadership/Management</i>	Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV <i>Education and Training of Leadership for government employee level III and IV</i>
Diklat Fungsional <i>Functional Education and Training</i>	Diklat Jarak Jauh Statistik Tingkat Dasar <i>Education and Training of Basic Statistic</i>
	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli <i>Education and Training of Advanced Statistics</i>
	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil <i>Education and Training of Skilled Computer Practitioner</i>
	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli <i>Education and Training of Advanced Computer Practitioner</i>
Diklat Teknis <i>Technical Education and Training</i>	Komputer / <i>Computer</i>
	- Multimedia / <i>Multimedia</i>
	- Jaringan / <i>Network</i>
	- Database Terintegrasi / <i>Integrated Database</i>
	- Database Berbasis Web dengan PHP / <i>Web-based Database with PHP</i>
	Statistik / <i>Statistics</i>
	- Pengolahan Data bagi KSK / <i>Data Management for KSK</i>
	- Pengolahan Data / <i>Data Management</i>
	Lain-lain / <i>Others</i>
	- Bendaharawan / <i>Treasurer</i>
- Kompetensi / <i>Competency</i>	
Training ke Luar Negeri <i>Training Overseas</i>	Jepang / <i>Japan</i> : UNSIAP
	India / <i>India</i> : Colombo Plan & ITEC
	Korea / <i>Korea</i>
Training Internasional <i>International Training</i>	UNSIAP (Regional Course on Poverty Measurements)
	JICA (Use and Analysis of Small Area Statistics)
	UNP (In-Country Training)
	JBIC (In-Country Training)

Pada tahun 2004 BPS mendapat Sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) berdasarkan keputusan Kepala LAN-RI nomor 787/I/10/8/2004 sebagai ijin untuk menyelenggarakan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Golongan I, II dan III) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan III.

Dengan demikian Pusdiklat BPS tidak hanya menyelenggarakan diklat komputer dan statistik saja tetapi diklat kepemimpinan, manajemen dan diklat teknis lainnya dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan instansi Pemerintah selain BPS dan lembaga Internasional.

f. Beasiswa dan Tugas Belajar

Selain menyelenggarakan kediklatan, Pusdiklat BPS mengkoordinir pelaksanaan tugas belajar atau karya siswa untuk pegawai BPS di seluruh Indonesia. Beberapa program beasiswa yang bekerja sama dengan BPS antara lain:

In 2004 Indonesian National Administration Institute handed BPS a certification, by the Decree of the Head of the National Administration Institute Number 787/I/10/8/2004 by which BPS is entrusted to organize Education and Training for Government Employee Candidates Level I, II, and III (Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II, III), and Leadership Education and Training Level III and IV for Government Employee (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV).

As a result, Pusdiklat BPS task is to organize not only computer and statistics training, but also leadership, management and other technical subject, in coordination with other government agencies besides BPS and international institutions.

f. Scholarship and Study Assignment

In addition to running education and training activities, Pusdiklat BPS also coordinates the implementation of study assignment for BPS employees all over Indonesia. Some scholarships in which BPS is involved include:

Tabel 7.10. Program Beasiswa di BPS**Table 7.10. Scholarship Program in BPS**

	Program S2 Universitas/Sponsor <i>Master Programme of Universities/Sponsor</i>	Jumlah Siswa <i>Number of Student</i>
Dalam Negeri <i>Local</i>	Institut Teknologi Sepuluh November/APBN BPS	75
	Institut Pertanian Bogor/APBN BPS	50
	Universitas Indonesia/APBN BPS	50
	Pusbindiklatren/BAPPENAS	>25
	Universitas Pajajaran (Rencana 2009)	50
Luar Negeri <i>International</i>	S2 dan S3 Australian Development Scholarship (ADS)	>25
	S2 Australian Partnership Scholarship (APS)	>25
	S2 Double Degree Pusbindiklatren	25
	S2 Monbukagakusho-Jepang	>25
	S2 Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS)	>25
	S2 StuNed (Studeren in Nederland)	<50
	S2 NFP (Netherlands Fellowship Programme)	<50
	S2 DAAD Jerman	<50

g. Pelatihan khusus

Beberapa pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS untuk meningkatkan kompetensi dari para pegawai BPS secara khusus dan PNS secara umum adalah :

1) *Poverty Measurements*

Diklat *Poverty Measurements* bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan analisis para peserta dalam mengukur dan menganalisa masalah kemiskinan, yang merupakan salah satu target dalam *Millenium Development Goals* (MDG's). Peserta diklat merupakan pegawai statistik dari negara-negara di Asia Pasifik dan para pengajar dari *United Nations of Statistical Institute Asia Pacific* (UNSIAP) yang datang secara khusus mendampingi peserta. Di dalam diklat ini para peserta juga dapat mempresentasikan data dan masalah kemiskinan yang mereka

g. Special Training

Pusdiklat BPS also run various special trainings besides education and training to improve BPS employees competency in particular, and all government employees in general. These training include the following:

1) *Poverty Measurements*

Education and training of poverty measurements aims at enhancing the competency and analytical skill of participants in measuring and analyzing poverty problems, one of the targets specified in the *Millenium Development Goals* (MDGs). Participants enrolled in this training are statistical staff from Asia-Pacific countries, and the lecturers are teaching staff from the *United Nations of Statistical Institute Asia Pacific* (UNSIAP), who were exclusively invited to accompany and guide the participants. In this training, participants are given the opportunity to present data and poverty problems taken from his or her own country. A visit

hadapi di negara masing-masing. Pada diklat ini terdapat pula sesi untuk meninjau daerah miskin di Jakarta. Dilaksanakan pula diklat *poverty measurements* khusus bagi pegawai BPS di Indonesia yang dibiayai dana APBN.

to some poverty-stricken area in Jakarta is also on the agenda. Funded by the state budget, special education and training in poverty measurement is also held specifically for BPS employees.



Gambar 7.5. Dengan bantuan lembaga internasional, BPS-melalui Pusdiklat BPS- memberikan pelatihan statistik kepada peserta dari BPS dan pegawai lembaga statistik negara-negara lain, seperti negara-negara Asia Pasifik. Salah satu contohnya adalah Pelatihan Penghitungan Penduduk Miskin pada 20-30 Maret 2007 yang didanai oleh UN-SIAP (*United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific*).

Figure 7.5. *BPS education and training center, assisted by international institutes, also gives statistical training to participants from BPS itself and staff of statistical agency from other countries in Asia-Pacific region. One example is the participants of region course of poverty measurement, held in March 20-30, 2007, financial by UN-SIAP (United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific).*

2) *Geographic Information System (GIS)*

Diklat GIS merupakan diklat yang didanai oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)*. Diklat ini diikuti oleh pegawai-pegawai BPS di tingkat kabupaten. Pengajar diklat ini adalah staf ahli dari JICA dan salah satunya adalah penemu dari sistem *Grid Square*. Pada diklat ini para peserta diberi pengetahuan GIS dengan pemanfaatan peta tematik dan data tekstual yang kemudian diaplikasikan dengan sistem *Grid Square*. Diklat ini sangat bermanfaat karena untuk pembuatan *Grid Square* peserta cukup menggunakan fasilitas *Ms Excel* yang ada di PC masing-masing.

2) *Geographic Information Systems (GIS)*

Geographic information system education and training is funded by Japan International Cooperation Agency (JICA). It is instituted for BPS employees in regency (kabupaten) level. The teaching staff for this training is JICA experts, including the founder of grid square system. This education and training is highly useful and the grid square system only requires Ms Excel facility on each PC.

3) Pengindraan Jarak jauh Untuk Pembuatan Blok Sensus

Diklat Pengindraan Jarak Jauh Untuk Pembuatan Blok Sensus dengan Satelit merupakan diklat yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan metodologi sensus dan survey. Pada diklat ini para peserta dibekali pengetahuan untuk pemanfaatan foto citra satelit dalam membuat blok sensus untuk sensus atau survey yang akan dilaksanakan. Dengan memanfaatkan pencitraan jarak jauh ini maka blok sensus yang dibuat akan semakin akurat. Diklat ini diikuti oleh perwakilan dari tiap BPS Provinsi di Indonesia. Dalam melaksanakan diklat ini, BPS bekerjasama dengan LAPAN.

4) *Training of Trainer* KSK Pengolahan Data Statistik

Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik adalah diklat yang bertujuan meningkatkan kompetensi KSK di daerah. Dengan diklat ini diharapkan agar para KSK terlatih mampu menyusun Kecamatan Dalam Angka di unit kerjanya masing-masing. Hal ini akan memperluas kemampuan kerja para KSK yang tidak hanya menjadi petugas lapangan (pengumpulan data) tetapi juga mampu melakukan analisis data. Diklat TOT KSK angkatan pertama (dilaksanakan tahun 2008) ditujukan kepada para KSK Teladan dari 33 BPS Provinsi seluruh Indonesia yang diundang ke Jakarta untuk mengikuti diklat dan kegiatan seremonial lainnya.

5) *Sample Design for Household and Establishment Survey*

Workshop Sample Design for Household and Establishment Survey bertujuan meningkatkan kemampuan para peserta dalam hal teknik design sampel survey. Diklat ini dilak-

3) *Remote Sensing for Developing Census Blocks*

Remote sensing for developing census blocks education and training is aiming at improving methodology of census and survey. Participants are trained to utilize satellite image in developing census block for certain census or survey activity. The utilization of remote sensing technology can improve the accuracy of census blocks. This training is intended for BPS provincial representatives throughout Indonesia. In organizing this training, BPS collaborates with LAPAN.

4) *Training of Trainer of KSK Statistical Data Management*

Trainer of KSK statistical data management education and training is aiming at improving the competency of KSK. After attending this training each KSK are expected to gain the required skill to prepare Sub-District in Figures (Kecamatan Dalam Angka) for each of their respective working area. This training will also develop the necessary ability for their position; KSKs requires skill not only in data collection, but also competent in data analysis. The first target participants of this training are model KSK (KSK Teladan) from 33 BPS provinces throughout Indonesia (held in 2008). They are invited to Jakarta to participate in the training and attend other ceremonial programs.

5) *Sample Design for Household and Establishment Survey*

A workshop on sample design for household and establishment surveys aims at improving the ability of participants in the technique of designing sample survey. BPS runs this training

sanakan atas kerjasama UNSIAP dan BPS. Peserta diklat ini adalah para staf kantor statistik negara-negara Asia Pasific. Dengan mengikuti diklat ini diharapkan para peserta dapat melakukan teknik pengambilan sampel pada survei yang akan dilaksanakan dengan metodologi yang benar.

in cooperation with UNSIAP. Participants of this training are staff of various statistical institutes in Asia-Pacific countries. By participating in this training, the participants are expected to gain sufficient skill for formulating sampling technique for certain surveys based on proper methodology.



Gambar 7.6. Maket rencana gedung Pusdiklat BPS masa yang akan datang.

Figure 7.6. The miniature of future Education and Training Center of BPS-Statistics Indonesia.

8

DAFTAR ALAMAT BPS PROVINSI *BPS REGIONAL OFFICE ADDRESS*

<http://www.bps.go.id>



SUMATERA

1. BPS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM/*NANGROE ACEH DARUSSALAM REGIONAL OFFICE*
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.50, Banda Aceh
☎ (0651) 23005, 22862
Fax. (0651)33632
✉ bps1100@bps.go.id
homepage: <http://aceh.bps.go.id>
2. BPS PROVINSI SUMATERA UTARA/*SUMATRA UTARA REGIONAL OFFICE*
Jl. Asrama No.179, Medan - 20123
☎ (061) 8452343 (*Hunting*) Ext. 100
Fax. (061) 8452773
✉ bps1200@bps.go.id
homepage: <http://sumut.bps.go.id>
3. BPS PROVINSI SUMATERA BARAT/*SUMATRA BARAT REGIONAL OFFICE*
Jl. Khatib Sulaiman No.48 Padang 25136
☎ (0751) 442158- 59
Fax. (0751) 442161
✉ bps1300@bps.go.id
homepage: <http://sumbar.bps.go.id>
4. BPS PROVINSI RIAU/*RIAU REGIONAL OFFICE*
Jl. Pattimura No.12, PEKANBARU 28131
☎ (0761) 23042
Fax.(0761) 21336
✉ bps1400@bps.go.id
homepage: <http://riau.bps.go.id>
5. BPS PROVINSI JAMBI/*JAMBI REGIONAL OFFICE*
Jl. A. Yani No.4 Telanaipura, Jambi 36122
☎ 0828 - 7407782, Langsung 0828 – 7407775
Fax. (0741) 60802
✉ bps1500@bps.go.id
homepage: <http://jambi.bps.go.id>
6. BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN/*SUMATRA SELATAN REGIONAL OFFICE*
Jl. Kapten Anwar Sastro No.1694/1131, Kel. Sungai Pangeran, Palembang - 30129
☎ (0711) 318456, 351665
Fax. (0711) 353174
✉ bps1600@mailhost.bps.go.id
homepage: <http://sumsel.bps.go.id>

7. BPS PROVINSI BENGKULU/*BENGKULU REGIONAL OFFICE*
Jl. Adam Malik Km. 8 Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu 38225
☎ (0736) 349117- 118
Fax. (0736) 349115
✉ bps1700@bps.go.id
homepage: <http://bengkulu.bps.go.id>
8. BPS PROVINSI LAMPUNG/*LAMPUNG REGIONAL OFFICE*
Jl. Basuki Rahmat No.54, Telukbetung, Bandar Lampung 35215
☎ (0721) 482909, 474326, Langsung 484575
Fax. (0721) 484329
✉ bps1800@bps.go.id
homepage: <http://lampung.bps.go.id>
9. BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG/*BANGKA BELITUNG REGIONAL OFFICE*
Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov Kep. Bangka Belitung, Air Itam , Pangkalpinang
☎ (0717) 439421
Fax. (0717) 439425
✉ bps1900@bps.go.id
homepage: <http://babel.bps.go.id>
10. BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU/*KEPULAUAN RIAU REGIONAL OFFICE*
Jl. Ir. Sutami No.34, Tanjungpinang 29100
☎ (0771) 312718
Fax (0771) 23680
✉ bps2100@bps.go.id
homepage: <http://kepri.bps.go.id>

JAWA

11. BPS PROVINSI DKI JAKARTA/*DKI JAKARTA REGIONAL OFFICE*
Jl. Medan Merdeka Selatan No.8–9 Blok D, Lt. 3 Jakarta
☎ (021) 3822290
Fax. (021) 3840084
✉ bps3100@bps.go.id
homepage: <http://regional.bps.go.id/~jakarta>
12. BPS PROVINSI JAWA BARAT/*JAWA BARAT REGIONAL OFFICE*
Jl. Penghulu Hasan Mustapa No.43, Bandung 40124
☎ (022) 7272595, 7201696 Langsung 7276980
Fax. (022) 7213572
✉ bps3200@bps.go.id
homepage: <http://jabar.bps.go.id>

13. BPS PROVINSI JAWA TENGAH/*JAWA TENGAH REGIONAL OFFICE*
Jl. Pahlawan 6, Kota Semarang 50241
☎ (024) 8311242, 8412802, 8412804, 8412805, 8449496
Fax. (024) 8311195
✉ bps3300@bps.go.id
homepage: <http://jateng.bps.go.id>
14. BPS PROVINSI D. I. YOGYAKARTA/*DI YOGYAKARTA REGIONAL OFFICE*
Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
☎ (0274) 4342234 Hunting
Fax. (0274) 4342230
✉ bps3400@bps.go.id
homepage: <http://regional.bps.go.id/~yogya>
15. BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR/*JAWA TENGAH REGIONAL OFFICE*
Kompleks Delta Permai, Jl. Panjang Jiwo Permai No.1c, Surabaya
☎ (031) 8438873 (Alamat Sementara)
✉ bps3500@bps.go.id
homepage: <http://jatim.bps.go.id>
16. BPS PROVINSI BANTEN/*BANTEN REGIONAL OFFICE*
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Blok Instansi Vertikal Kav.H1-2
Jl. Raya Palima Pakupatan Serang, Banten 42171
☎ (0254) 267027
✉ bps3600@bps.go.id
homepage: <http://banten.bps.go.id>
- BALI & NUSATENGGAH**
17. BPS PROVINSI BALI/*BALI REGIONAL OFFICE*
Jl. Raya Puputan No.1 Renon Denpasar
☎ (0361) 238159, 243696
Fax. (0361) 238162
✉ bps5100@bps.go.id
homepage: <http://bali.bps.go.id>
18. BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT/*NUSA TENGGARA BARAT REGIONAL OFFICE*
Jl. Gunung Rinjani No.2, Mataram. 83125
☎ (0370) 641242 , 621385, 638321
Fax. (0370) 623801
✉ bps5200@bps.go.id
homepage: <http://ntb.bps.go.id>

19. BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / *NUSA TENGGARA TIMUR REGIONAL OFFICE*

Jl. R. Suprpto No.5, Kupang - 85111

☎ (0380) 826289, 821755,

Telex 35415, Fax. (0380) 833124

✉ bps5300@bps.go.id

homepage: <http://regional.bps.go.id/~ntt>

KALIMANTAN20. BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT / *KALIMANTAN BARAT REGIONAL OFFICE*

Jl. Sutan Syahrir 24/42, Pontianak 78116

☎ (0561) 735345, 765742, 765741

Fax. (0561) 732184

✉ bps6100@bps.go.id

homepage: <http://kalbar.bps.go.id>

21. BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / *KALIMANTAN TENGAH REGIONAL OFFICE*

Jl. Kapten Piere Tendean No.6, Palangka Raya, 73112

☎ (0536) 3238105,

Fax. (0536) 3221380

✉ bps6200@bps.go.id

homepage: <http://kalteng.bps.go.id>

22. BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / *KALIMANTAN SELATAN REGIONAL OFFICE*

Jl. KS. Tubun No.117, Banjarmasin 70242

☎ (0511) 3262314

fax. (0511) 3261585

✉ bps6300@bps.go.id

homepage: <http://regional.bps.go.id/~kalsel>

23. BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR / *KALIMANTAN TIMUR REGIONAL OFFICE*

Jl. Kemakmuran No.4, Samarinda 75117, P.O. Box 1127

☎ (0541) 743372, 732793

Fax. (0541) 201121

✉ bps6400@bps.go.id

homepage: <http://kaltim.bps.go.id>

SULAWESI24. BPS PROVINSI SULAWESI UTARA / *SULAWESI UTARA REGIONAL OFFICE*

Jl. 17 Agustus, Manado 95119

☎ (0431) 847044

Fax. (0431) 862204

✉ bps7100@bps.go.id

homepage: <http://sulut.bps.go.id>

25. BPS PROVINSI SULAWESITENGAH / *SULAWESI TENGAH REGIONAL OFFICE*

Jl. Prof. Moh. Yamin No.48, Palu 94114

☎ (0451) 483610, 483611, 483613

Fax. (0451) 983612

✉ bps7200@bps.go.id

homepage: <http://sulteng.bps.go.id>

26. BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN / *SULAWESI SELATAN REGIONAL OFFICE*

Jl. Haji Bau No.6, Makassar 90125

☎ (0411) Langsung 872879 , 854838,

Fax. (0411) 851225

✉ bps7300@bps.go.id

homepage: <http://sulsel.bps.go.id>

27. BPS PROVINSI SULAWESITENGGARA / *SULAWESI TENGGARA REGIONAL OFFICE*

Jl. Made Sabara No.3, Kendari 93111

☎ (0401) 321751

Fax. (0401) 322355

✉ bps7400@bps.go.id

homepage: <http://sulteng.bps.go.id>

28. BPS PROVINSI GORONTALO / *GORONTALO REGIONAL OFFICE*

Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe No.117

☎ (0435) 834596, 834598, 824802

Fax (0435) 834597

✉ bps7500@bps.go.id

homepage: <http://gorontalo.bps.go.id>

29. BPS PROVINSI SULAWESI BARAT / *SULAWESI BARAT REGIONAL OFFICE*

Jl. KH. Ahad No.9, Mamuju 91511

☎ (0426) 21116

✉ bps7600@bps.go.id

homepage: <http://sulbar.bps.go.id>

MALUKU & PAPUA30. BPS PROVINSI MALUKU / *MALUKU REGIONAL OFFICE*

Jl. Haruhun, Karang Panjang Komplek Puleh, Ambon 97121

☎ (0911) 353306, 342280

Fax. (0911) 343001

✉ bps8100@bps.go.id

homepage: <http://maluku.bps.go.id>

31. BPS PROVINSI MALUKU UTARA / *MALUKU UTARA REGIONAL OFFICE*

Jl. Stadion No.65, kel. Stadion, Kec. Ternate Selatan, Ternate 97712

☎ (0921) 327878

Fax (0921) 326301

✉ bps8200@bps.go.id

32. BPS PROVINSI PAPUA / *PAPUA REGIONAL OFFICE*

Jl. Dr. Sam Ratulangi, Dok II Jayapura 99112

☎ (0967) 534519, 533028

Fax. (0967) 536490

✉ bps9300@mailhost.bps.go.id

homepage: <http://regional.bps.go.id/~irja>

33. BPS PROVINSI PAPUA BARAT / *PAPUA BARAT REGIONAL OFFICE*

Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Papua Barat 98312

☎ (0986) 2701952,

Fax (0986) 213995

✉ bps9100@mailhost.bps.go.id

LAMPIRAN/ APPENDIX

Penyunting Bahasa Inggris/ English Editor:

Dr. Payung Surbakti

Tim Penyusun/ Editor Team:

1. M. Sairi Hasbullah, M.A.
2. Ir. Rina Dwi Sulastri, M.Sc.
3. Nanang Triono Basuki, S.H.
4. Bana Bodri, M.A.
5. Nurbaety Sentram, S.Si.
6. Mimin Karmiati, M.Si.
7. Diana Aryanti, S.P.
8. Melly Merliana Sari, S.H.
9. Nenny Rianarizkiwati, S.H.
10. Ari Setiadi Gunawan
11. Drs. Agusman Simbolon
12. Dewi Sri Takarini, S.E., M.A.
13. M. Ari Anggorowati, S.Kom.
14. Armed Jahja, S.Ap.